

Katalog: 9199011.51



TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI 2018



TINJAUAN PEREKONOMIAN BALI 2018

I S S N : 2477-7587

Nomor Publikasi : 51550.1920

Katalog : 9199011.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 82 halaman

Naskah : Bidang Nerwilis

Penyunting : Bidang Nerwilis

Disain Kover : Bidang IPDS

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Bali

Dicetak Oleh : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun
Tinjauan Perekonomian Bali 2018

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Adi Nugroho, M.M

Penanggung Jawab Teknis:

Agus Gede Hendrayana Hermawan, SE., MSi.

Koordinator:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST., MSi.

Anggota:

I Dewa Made Agus Arsana Dwipa, SST.

Ni Made Wahyu Wijantari, SST., MSi.

Disain Kover:

Dwi Yustiani, SST.

KATA PENGANTAR

Publikasi “Tinjauan Perekonomian Bali 2018” ini merupakan edisi lanjutan dari publikasi dengan nama sama yang pertama kali di rilis pada tahun 2012. Tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk melihat gambaran sosial dan ekonomi di wilayah Bali.

Publikasi Tinjauan Perekonomian Bali ini kiranya dapat memberikan gambaran lebih dekat mengenai kondisi makro ekonomi serta sosial di Provinsi Bali selama tahun 2018. Publikasi ini membahas mengenai kontribusi serta pertumbuhan ekonomi, inflasi, perdagangan luar negeri serta indikator sosial lain seperti halnya kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.

Akhir kata semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat untuk siapa saja yang membacanya. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan di edisi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Denpasar, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Bali



Ir. Adi Nugroho M.M

DAFTAR ISI

Bab	Subbab	Keterangan	Halaman
I		Perkembangan Ekonomi dan Inflasi	1
	I.1	Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi	1
	I.2	Perkembangan Inflasi dan IHK	23
II		Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata	27
	II.1	Perdagangan Luar Negeri	27
	II.2	Perkembangan Pariwisata	33
III		Pembangunan Sosial dan Pembangunan manusia	39
	III.1	Perkembangan Kondisi Kemiskinan	39
	III.2	Distribusi Pendapatan	43
	III.3	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	53
	II.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61

DAFTAR TABEL

Subbab	No	Keterangan	Halaman
I.1	I.1	Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2014 -2018	5
	I.2	Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali	10
	I.3	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pertumbuhan PDRB Bali, 2014 -2018	12
	I.4	Indikator PDRB Provinsi Bali, 2014 -2018	15
	I.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 -2018 (Miliar Rp)	16
	I.6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 -2018 (Miliar Rp)	17
	I.7	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 -2018 (Persen)	19
	I.8	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 -2018 (Persen)	21
	I.9	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 - 2018	22
	I.10	Laju Inflasi Singaraja dan Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran, 2014 - 2018	25
II.1	II.1	Ekspor Bali Menurut Negara Tujuan, 2014 - 2018	29

Subbab	No	Keterangan	Halaman
	II.2	Ekspor Bali Menurut Komoditas Utama, 2018	30
	II.3	Impor Bali Menurut Negara Asal, 2018	31
	II.4	Impor Bali Menurut Komoditas, 2018	32
II.2	II.5	Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Kebangsaan, Januari – Desember 2018	35
III.4	III.1	Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2011-2018	64
	III.2	Perkembangan IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2015 - 2018	66
	III.3	Pertumbuhan IPM dan Komponennya Bali, 2016 - 2018	68
	III.4	Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Bali, 2012 - 2018	69
	III.5	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali Menurut Kabupaten/kota, 2012 - 2018	73
	III.6	Rata-rata Lama Sekolah/Mean Years of Schooling (MYS) Bali Menurut Kabupaten/kota, 2012 - 2018	76
	III.7	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten /kota, 2016-2018	78

DAFTAR GRAFIK

Subbab	No	Keterangan	Halaman
I.1	I.1	Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Bali, 2014 - 2018	1
	I.2	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Bali, 2014 - 2018 (Persen)	3
	I.3	Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)	4
	I.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Perbandingannya dengan Nasional, 2014 - 2018 (Persen)	7
	I.5	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)	8
	I.6	Rata – Rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2014 - 2018 (Persen)	9
	I.7	Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)	11
	I.8	PDRB Per Kapita Provinsi Bali, 2012 – 2017 (juta rupiah)	14
	I.9	Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut	18

Subbab	No	Keterangan	Halaman
		Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 – 2018 (Triliun Rupiah)	
I.2	I.10	Inflasi Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2000 - 2018	24
	I.11	Inflasi Bulanan Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2016 - 2018	24
II.1	II.1	Perkembangan Ekspor, Impor dan Net Ekspor Bali, 1990 - 2018	28
	II.2	Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali dan Pertumbuhannya	34
	II.3	TPK Hotel Bintang, Non Bintang dan Kunjungan Wisman	36
	II.4	Perkembangan Rata-rata Lama Menginap Hotel Bintang 2001-2017	37
III.1	III.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2013 - 2018	40
	III.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2013 - 2018	41
	III.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali, 2013 - 2018	42
	III.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali, 2013 - 2018	43
	III.5	Koefisien Gini Bali dan Nasional, 2008 - 2018	46
	III.6	Koefisien Gini Kabupaten/Kota, 2017 - 2018	47
	III.7	Distribusi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Bali, 2014 - 2018	49
	III.8	Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2018	50

Subbab	No	Keterangan	Halaman
	III.9	Distribusi Konsumsi Makanan Kabupaten/Kota di Bali, 2017 – 2018 Beserta Konsumsi Per Kapitanya	51
	III.10	Konsumsi Makanan dan Non Makanan pada Golongan Pengeluaran, 2017 – 2018	52
III.3	III.11	UMP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali, 2017 – 2018 beserta perubahannya	55
	III.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali, Nasional dan Beberapa Provinsi, 1996 - 2018	56
	III.13	TPAK Bali Bulan Agustus dan Februari, 2014 - 2018	58
	III.14	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Usia, 2018	59
	III.15	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Sektor, 2018	60
III.4	III.16	Target dan Realisasi IPM Bali Menurut RPJMD	62
	III.17	IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Bali, 2013 - 2018	65
	III.18	Pergerakan Status Capaian IPM Bali, 2013 - 2018	67
	III.19	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Pertumbuhannya, 2018	70
	III.20	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali, 2010 – 2018 (Tahun)	71

Subbab	No	Keterangan	Halaman
	III.21	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Kenaikannya, 2010 – 2018 (Tahun)	74
	III.22	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali, 2010 - 2018 (Rp 000)	77
	III.23	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali, 2010 - 2018 (Rp 000)	77
	III.24	IPM Beberapa Provinsi di wilayah JABALNUSRA	79

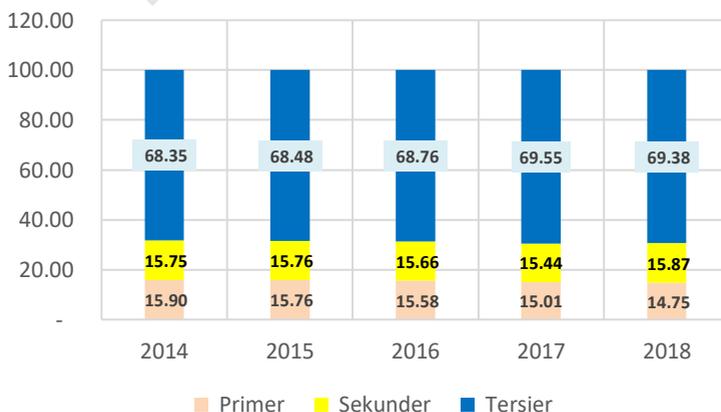
BAB I Perkembangan Ekonomi dan Inflasi

I.1 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2018 perekonomian Bali masih didominasi oleh lapangan usaha tersier dengan *share* sebesar 69,38 persen; diikuti oleh lapangan usaha primer 14,75 persen dan lapangan usaha sekunder sebesar 15,87 persen. Selama periode lima tahun terakhir, lapangan usaha tersier menjadi lapangan usaha dominan yang *share*-nya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, lapangan usaha tersier tercatat memberikan *share* sebesar 68,35 persen kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 69,38 persen.

Grafik I.1

Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB
Bali, 2014 - 2018



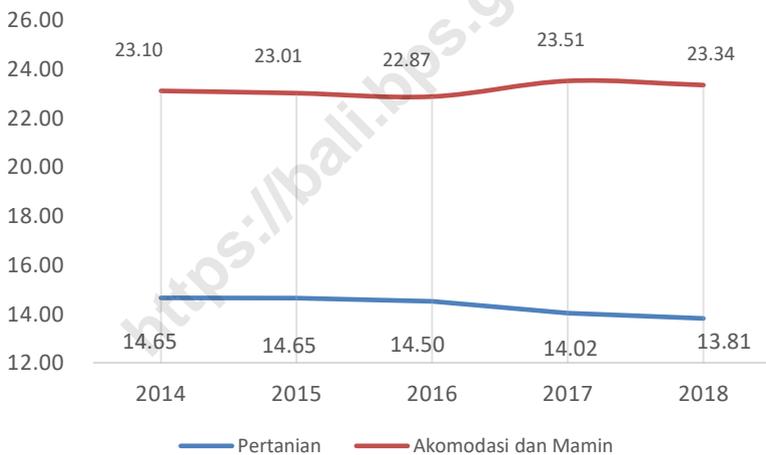
Lapangan usaha primer yang berbasis pada lapangan usaha pertanian mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, lapangan usaha primer tercatat memberikan *share* sebesar 15,90 persen kemudian menurun di tahun 2018 menjadi sebesar 14,75 persen. Hal senada juga terjadi untuk lapangan usaha sekunder yang *share*-nya mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Walaupun di tahun 2018, *share* lapangan usaha sekunder mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mengurangi *share* lapangan usaha tersier jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, jika dijabarkan secara lebih rinci per lapangan usaha maka selama periode tahun 2014 – 2018 struktur perekonomian Bali tidak banyak mengalami perubahan.

Lapangan usaha tersier yang memiliki *share* paling besar didominasi oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi tertinggi sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali. Secara nominal, jumlah kunjungan wisman ke Bali pada tahun 2014 mencapai 3,76 juta orang, terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 mencapai 6,07 juta orang, atau mengalami pertumbuhan sebesar 61,16 persen.

Hal sebaliknya terjadi pada lapangan usaha pertanian yang justru memiliki kecenderungan semakin menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, kontribusi lapangan usaha pertanian tercatat sebesar 13,81 persen setelah lima tahun sebelumnya yakni di tahun 2014 tercatat sebesar 14,65 persen. Penurunan signifikan terjadi selama dua tahun

terakhir, pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha pertanian mengalami penurunan menjadi 14,02 persen dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 14,50 persen.

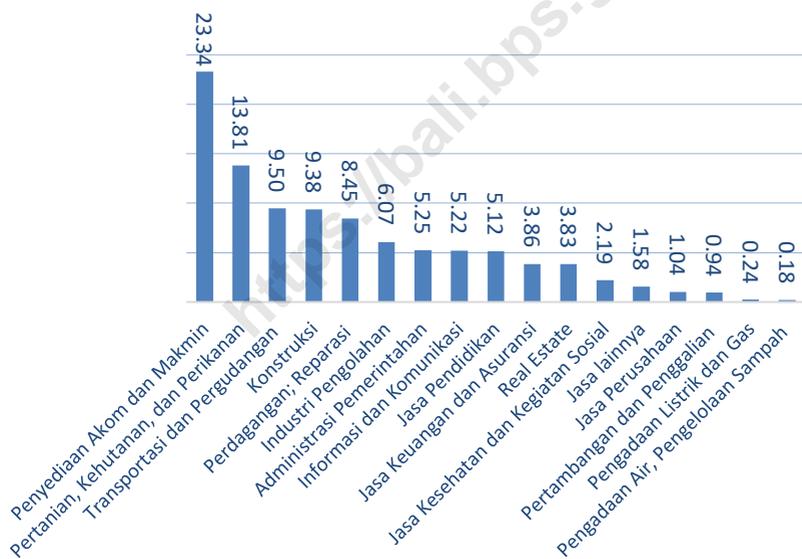
Grafik I.2
Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha
Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Bali,
2014 – 2018 (Persen)



Kontribusi lapangan usaha terbesar ketiga yang disumbang dari lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha transportasi. Sumbangan lapangan usaha tersebut tercatat sebesar 9,50 persen di tahun 2018. Jika dilihat lebih rinci, 50 persen lebih kontribusi terhadap lapangan usaha transportasi merupakan sumbangan dari sub lapangan usaha angkutan udara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara

maupun domestik melalui angkutan udara memberikan pengaruh terhadap meningkatnya nilai tambah subkategori kedatangan angkutan udara. Pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 6,54 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 5,70 juta orang.

Grafik 1.3
Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha,
2018 (Persen)



Tabel I.1
Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2016 -2018

Lapangan Usaha		2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,50	14,02	13,81
B	Pertambangan dan Penggalian	1,08	0,99	0,94
C	Industri Pengolahan	6,39	6,09	6,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,24	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah DLL	0,18	0,18	0,18
F	Konstruksi	8,87	8,93	9,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	8,29	8,42	8,45
H	Transportasi dan Pergudangan	9,57	9,51	9,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,87	23,51	23,34
J	Informasi dan Komunikasi	5,18	5,20	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,15	4,02	3,86
L	Real Estat	4,05	3,96	3,83
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,04	1,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	4,93	5,12	5,25
P	Jasa Pendidikan	5,03	5,06	5,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	2,15	2,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,56	1,58
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kemajuan pembangunan di suatu daerah. PDRB dengan melihat nilai absolutnya menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. PDRB dilihat dari perubahan nilai atas dasar harga konstan (riil) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dipandang oleh banyak kalangan mampu menggambarkan kinerja pembangunan secara lebih jelas sehingga lebih sering digunakan dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan.

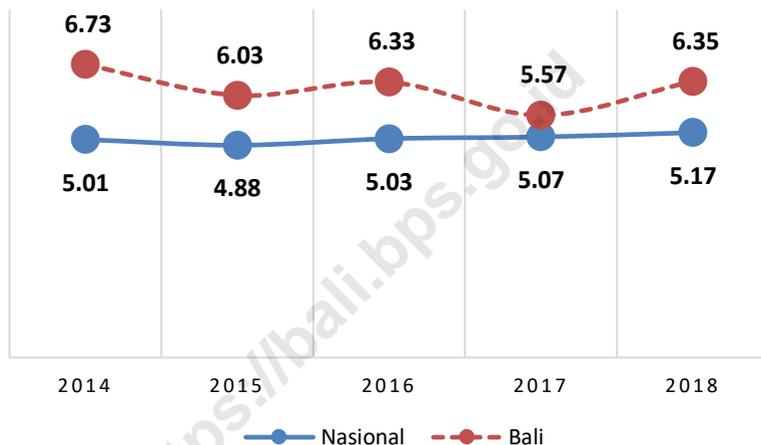
Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Teori ekonomi klasik juga mengisyaratkan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling penting untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,35 persen. Pertumbuhan ini relatif lebih tinggi dari angka nasional hanya tumbuh sebesar 5,17 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,57 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi lima

tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami perlambatan. Ekonomi Bali pada lima tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 6,73 persen.

Grafik I.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Perbandingannya dengan Nasional, 2014 – 2018 (Persen)

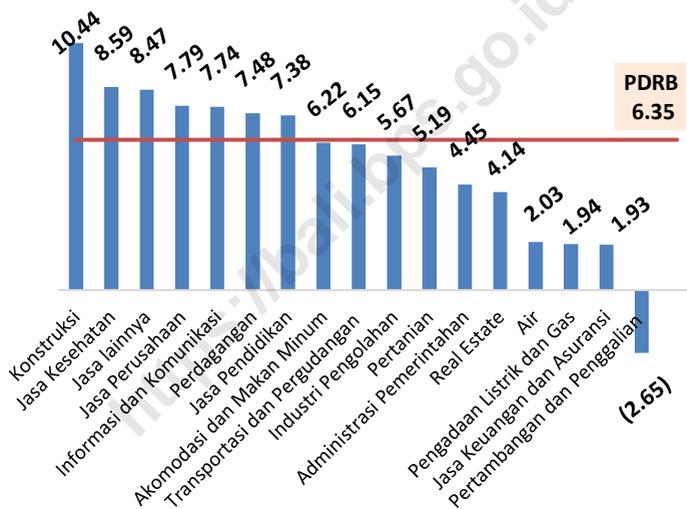


Selama periode lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Bali selalu berada di atas pertumbuhan nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Bali selalu berada di atas enam persen, kecuali pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,57 persen. Bencana erupsi Gunung Agung cukup memberi dampak bagi pariwisata di Bali yang turut mempengaruhi ekonomi Bali pada tahun 2017, selain juga dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global.

Dilihat lebih rinci pada pertumbuhan per lapangan usaha, lapangam usaha konstruksi memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 10,44 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua tercatat pada

lapangan usaha jasa kesehatan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,59 persen, disusul oleh lapangan usaha jasa lainnya yang tercatat tumbuh 8,47 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik I.5**.

Grafik I.5
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)

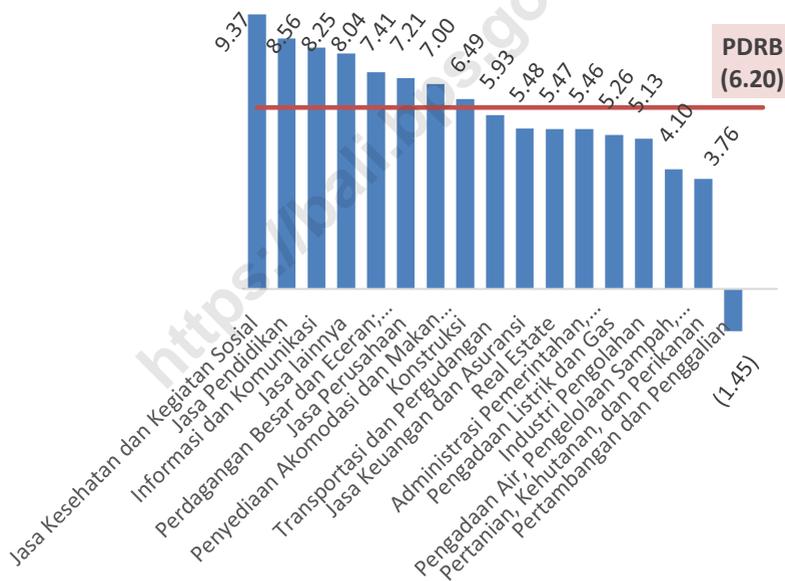


Jika dilihat secara rata-rata, maka rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 2014-2018 tercatat pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dengan pertumbuhan sebesar 10,22 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua diduduki oleh jasa pendidikan yang tercatat tumbuh sebesar 9,78 persen dan diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 7,91 persen. Penyediaan

akomodasi dan makan minum sebagai kontributor utama dalam ekonomi Bali memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,35 persen, sedangkan lapangan usaha penggalian menempati peringkat terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tercatat sebesar 0,63 persen.

Grafik I.6

Rata – Rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2014–2018 (Persen)



Selama periode tahun 2014 – 2018, ada 9 (sembilan) kategori yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 6,20 persen. Lapangan usaha tersebut antara lain Transportasi dan Pergudangan (5,93 %), Jasa

Keuangan dan Asuransi (5,48 %), Administrasi Pemerintahan (5,46 %), Real Estate (5,33 %), Pengadaan Listrik dan Gas (5,26 %), Industri Pengolahan (5,13 %), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,10 %), Pertanian (3,76 %) dan Penggalian (-1,45 %).

Tabel I.2

Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2014-2018

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.66	2.68	3.53	2.73	5.19	3.76
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.60	-6.83	4.28	-1.44	-2.65	-1.45
C	Industri Pengolahan	8.88	6.93	3.36	0.80	5.67	5.13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.97	1.59	8.31	5.48	1.94	5.26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.40	1.99	6.34	2.72	2.03	4.10
F	Konstruksi	1.80	5.01	7.26	7.95	10.44	6.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.17	7.94	6.64	7.84	7.48	7.41
H	Transportasi dan Pergudangan	5.84	4.63	8.03	5.00	6.15	5.93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.82	6.31	6.62	9.03	6.22	7.00
J	Informasi dan Komunikasi	7.21	9.67	8.54	8.10	7.74	8.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.34	6.66	8.06	2.43	1.93	5.48
L	Real Estat	8.89	5.12	4.85	4.34	4.14	5.47
M,N	Jasa Perusahaan	7.49	6.99	6.85	6.91	7.79	7.21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.75	8.27	5.44	-1.60	4.45	5.46

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**	Rata-rata
P	Jasa Pendidikan	10.58	8.95	8.91	7.00	7.38	8.56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.43	8.76	8.65	8.44	8.59	9.37
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.63	7.45	8.82	7.85	8.47	8.04
Produk Domestik Regional Bruto		6.73	6.03	6.33	5.57	6.35	6.20

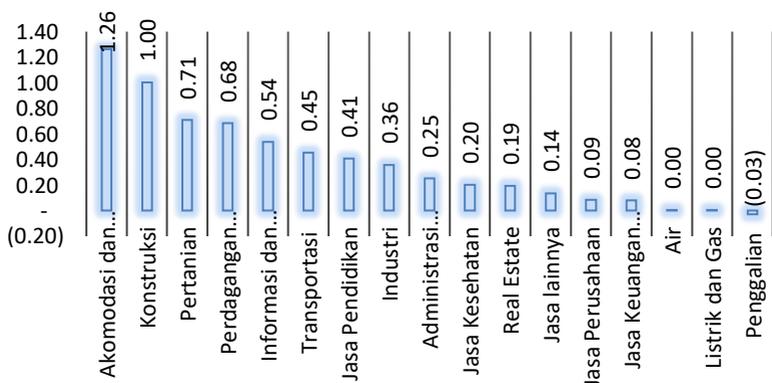
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Bali adalah Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori terhadap pertumbuhan yang dicapai suatu wilayah.

Grafik I.7

Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)



Pada **Grafik I.7** dapat dilihat peranan seluruh kategori terhadap pertumbuhan PDRB Bali. Pada tahun 2018, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar 1,26 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha konstruksi dengan sumbangan sebesar 1,00 persen. Sedangkan lapangan usaha penggalian menjadi sumber pertumbuhan dengan nilai negatif sebesar -0,03 persen. Lapangan usaha penggalian menghadapi beberapa kendala seperti lahan penggalian yang semakin berkurang, faktor cuaca alam dan regulasi pemerintah terkait perizinan usaha.

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum secara rata-rata memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang paling dominan.

Lapangan usaha konstruksi memiliki kontribusi tertinggi kedua pada tahun 2018. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha konstruksi mengalami tren peningkatan. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap pertumbuhan PDRB Bali. Perkembangan antar tahun juga relatif stagnan, tidak mengalami peningkatan pertumbuhan yang begitu berarti pada kedua lapangan usaha tersebut.

Tabel I.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha,
2014 - 2018

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.71	0.40	0.51	0.38	0.71
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.01	-0.09	0.05	-0.02	-0.03
C	Industri Pengolahan	0.59	0.47	0.23	0.05	0.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00
F	Konstruksi	0.18	0.47	0.68	0.75	1.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.63	0.70	0.59	0.70	0.68
H	Transportasi dan Pergudangan	0.44	0.34	0.59	0.37	0.45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.33	1.23	1.30	1.77	1.26
J	Informasi dan Komunikasi	0.46	0.62	0.57	0.55	0.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.35	0.28	0.34	0.11	0.08
L	Real Estat	0.42	0.25	0.23	0.21	0.19
M,N	Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.62	0.50	0.33	-0.10	0.25
P	Jasa Pendidikan	0.53	0.46	0.47	0.38	0.41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.26	0.19	0.19	0.19	0.20
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.12	0.11	0.14	0.12	0.14
Produk Domestik Regional Bruto		6.69	6.03	6.33	5.57	6.35

* Angka sementara

** Angka sementara

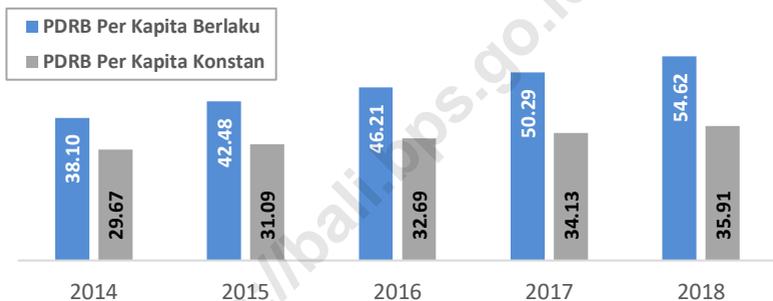
Nilai PDRB Bali dibagi dengan jumlah penduduk Bali dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan atau diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah atau wilayah bersangkutan. Indikator ini disebut dengan PDRB per kapita.

Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera. Kendati demikian, perlu diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah atau wilayah bersangkutan. Namun secara umum, data ini tetap berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah atau wilayah maupun antar tahun.

PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku di tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 54,62 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Bali mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp. 54,62 juta selama tahun 2018. Jumlah ini meningkat sebanyak Rp. 4,33 juta atau 8,6 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB per kapita Bali yang terbentuk di tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 35,91 juta.

Nilai ini meningkat sebanyak Rp. 1,78 juta atau 5,2 persen. Artinya, dengan mengesampingkan faktor inflasi harga yang terjadi selama setahun terakhir, nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk Bali secara rata-rata meningkat sebesar 5,2 persen.

Grafik I.8
PDRB Per Kapita Provinsi Bali, 2014 – 2018 (juta rupiah)



PDRB per kapita dapat pula digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah hasil pembangunan yang dilakukan selama ini secara umum telah dapat meningkatkan “kue perekonomian” secara makro. Dengan kata lain, dapat dilihat bagaimana penciptaan nilai tambah yang terjadi akibat proses pembangunan bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk di Bali. Nilai PDRB per kapita Bali yang meningkat menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang telah dilakukan di Bali mampu menciptakan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk Bali.

Tabel I.4
Indikator PDRB Provinsi Bali, 2014 - 2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	156.395,7	176.412,7	194.089,6	213.549,6	234.430,7
2	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	121.787,6	129.126,6	137.296,4	144.944,7	154.151,0
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (000 Org)	4.104,9	4.152,8	4.200,1	4.246,5	4.292,2
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rp)	38,10	42,48	46,21	50,29	54,62
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rp)	29,67	31,09	32,69	34,13	35,91

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dilihat dari sisi penggunaan, perubahan struktur ekonomi Bali tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Bali digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik

(dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Tabel I.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Bali,
2014-2018 (*Miliar Rp*)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	76 468,03	85 910,95	95 497,69	102 093,53	111 847,96
2. Konsumsi LNPRT	1 968,47	2 197,12	2 465,26	2 580,41	2 764,03
3. Konsumsi Pemerintah	15 985,79	17 750,68	19 977,81	21 954,17	23 593,75
4. PMTB	48 647,55	55 333,04	60 018,36	63 293,06	71 601,53
5. Perubahan Inventori	1 533,64	358,06	465,07	651,03	691,27
6. Ekspor Luar Negeri	55 101,73	63 633,15	78 332,45	86 638,51	96 685,77
7. Impor Luar Negeri	13 890,93	13 669,75	17 637,50	20 777,90	26 203,76
8. Net Ekspor Antar Daerah	-29 418,54	-35 100,58	-45 029,56	-42 883,22	-46 549,82
PDRB	156 395,73	176 412,67	194 089,58	213 549,58	234 430,72

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selama lima tahun terakhir, kondisi perekonomian Bali menunjukkan perkembangan yang stabil. Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif.

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Nilai PDRB ADHB selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan tren kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Pada tahun 2018, besaran PDRB Bali ADHB mencapai 234 triliun rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan 49,89 persen dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 156 triliun rupiah.

Tabel I.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Bali, 2014 - 2018 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	63 893,04	68 660,37	73 229,89	76 174,70	79 987,17
2. Konsumsi LNPRT	1 500,33	1 547,87	1 680,65	1 746,82	1 864,93
3. Konsumsi Pemerintah	12 138,66	12 934,62	13 756,97	14 483,45	14 929,13
4. PMTB	38 800,14	41 397,44	45 030,74	46 623,27	50 837,13
5. Perubahan Inventori	792,13	176,19	224,56	239,28	246,51
6. Ekspor Luar Negeri	43 139,80	45 736,99	52 314,23	56 024,96	59 638,40
7. Impor Luar Negeri	10 276,55	9 263,66	11 369,06	13 317,18	16 568,49
8. Net Ekspor Antar Daerah	-28 199,97	-32 063,26	-37 571,53	-37 030,61	-36 783,80
PDRB	121 787,57	129 126,56	137 296,45	144 944,69	154 150,98

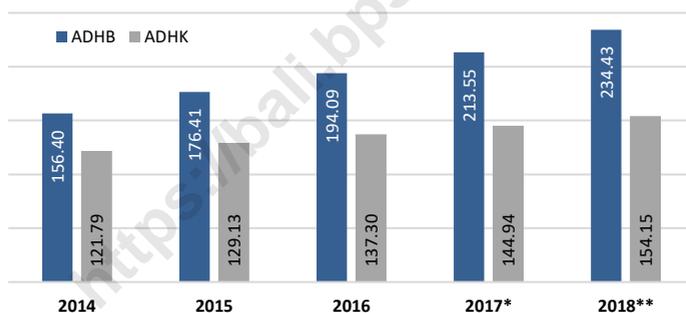
Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Untuk melihat perubahan PDRB secara kuantitas atau melihat perubahan volumenya, maka PDRB juga dinilai atas dasar harga konstan tahun 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan ini maka, faktor pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan, sehingga diperoleh gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja.

Grafik I.9
Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 – 2018 (Triliun Rupiah)



Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB komponen pengeluaran ADHK atau PDRB riil menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara nyata, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seperti halnya PDRB secara nominal, PDRB secara riil di Bali juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018.

TABEL I.7
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 - 2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	48,89	48,70	49,20	47,81	47,71
2. Konsumsi LNPRT	1,26	1,25	1,27	1,21	1,18
3. Konsumsi Pemerintah	10,22	10,06	10,29	10,28	10,06
4. PMTB	31,11	31,37	30,92	29,64	30,54
5. Perubahan Inventori	0,98	0,20	0,24	0,30	0,29
6. Ekspor	35,23	36,07	40,36	40,57	41,24
7. Impor	8,88	7,75	9,09	9,73	11,18
8. Net Ekspor Antar Daerah	-18,81	-19,90	-23,20	-20,08	-19,86
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB menurut pengeluaran, terdiri dari beberapa komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut antara lain: konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non profit (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Semua komponen tersebut, memiliki kontribusi untuk membentuk total PDRB pengeluaran.

Pada **tabel I.7** di atas, dapat dilihat bahwa komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang PDRB terbesar (hampir setengah dari total PDRB). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar produk (barang dan jasa) di Provinsi Bali masih digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Kontribusi komponen konsumsi

rumah tangga selama lima tahun terakhir berkisar antara 47,71 persen hingga 49,20 persen. Sementara itu, komponen ekspor juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB menurut pengeluaran Provinsi Bali. Kontribusi ekspor berada pada kisaran di atas 30 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini berarti, lebih dari 30 persen produk dari Bali mampu menembus pasar internasional, dan menunjukkan bahwa produk dari Provinsi Bali dapat diterima dengan cukup baik oleh pasar internasional.

Di sisi lain, Provinsi Bali juga melakukan impor guna memenuhi permintaan domestik. Pada tahun 2014, lebih dari lima persen permintaan domestik dipenuhi dari impor. Pada tahun-tahun berikutnya kontribusi impor mengalami fluktuasi yang terbilang rendah. Namun jika dilihat perkembangannya selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018, ketergantungan terhadap impor semakin meningkat, dari sebesar 8,88 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 11,18 persen pada tahun 2018. Perbandingan dengan ekspor juga menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor, atau dengan kata lain, neraca perdagangan luar negeri Bali selalu menunjukkan posisi “surplus”.

Selain komponen-komponen tersebut, komponen pengeluaran untuk kapital (PMTB), juga memiliki kontribusi yang cukup besar, sebanding dengan komponen ekspor yang mencapai kisaran 30 persen. Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah memiliki kontribusi di kisaran 10 persen, dan memiliki kecenderungan relatif stagnan selama

lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidaklah terlalu besar.

Tabel I.8
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2014 - 2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,16	7,46	6,66	4,02	5,00
2. Konsumsi LNPRT	1,24	3,17	8,58	3,94	6,76
3. Konsumsi Pemerintah	-8,63	6,56	6,36	5,28	3,08
4. PMTB	1,81	6,69	8,78	3,54	9,04
5. Perubahan Inventori	-12,52	-77,76	27,45	6,56	3,02
6. Ekspor	16,38	6,02	14,38	7,09	6,45
7. Impor	27,60	-9,86	22,73	17,14	24,41
8. Net Ekspor Antar Daerah	-4,26	13,70	17,18	-1,44	-0,67
Total PDRB	6,73	6,03	6,33	5,57	6,35

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kinerja pembangunan di bidang ekonomi Provinsi Bali menunjukkan hal yang positif. Selama periode tahun 2014-2018, pertumbuhan ekonomi Bali berada pada kisaran 5-6 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada tahun 2014, yakni sebesar 6,73 persen, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi

terendah tercatat pada tahun 2017, dengan pertumbuhan sebesar 5,57 persen.

Sementara itu, tingkat perubahan harga digambarkan melalui indeks implisit PDRB. Selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan adanya kenaikan harga dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, indeks implisit PDRB sebesar 152,08 mengalami peningkatan dari indeks implisit PDRB di tahun 2014 sebesar 128,42.

Tabel I.9
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Bali, 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Konsumsi Rumah Tangga	119,68	125,12	130,41	134,03	139,83
2. Konsumsi LNPRT	131,20	141,94	146,68	147,72	148,21
3. Konsumsi Pemerintah	131,69	137,23	145,22	151,58	158,04
4. PMTB	125,38	133,66	133,28	135,75	140,84
5. Perubahan Inventori	193,61	203,23	207,10	272,08	280,42
6. Ekspor	127,73	139,13	149,73	154,64	162,12
7. Impor	135,17	147,56	155,14	156,02	158,15
8. Net Ekspor Antar Daerah	104,32	109,47	119,85	115,80	126,55
Total PDRB	128,42	136,62	141,37	147,33	152,08

Keterangan:

*) Angka Sementara

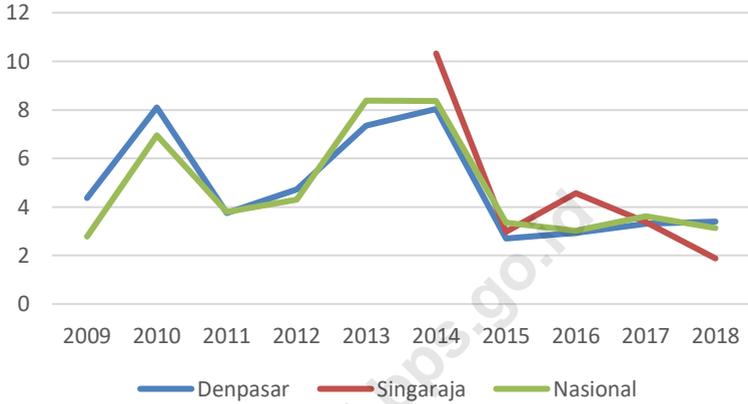
**) Angka Sangat Sementara

I.2 Perkembangan Inflasi dan IHK

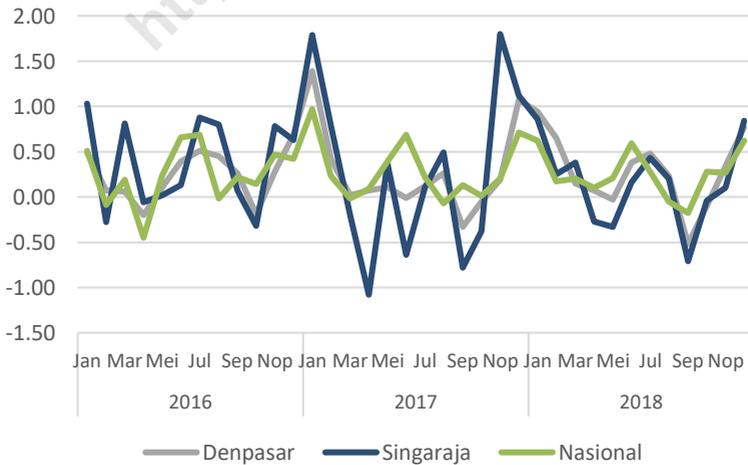
Salah satu indikator ekonomi yang kiranya perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini indeks harga konsumen (IHK).

Laju inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. Selama kurun waktu satu dekade terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 perhitungan inflasi menggunakan dua tahun dasar yaitu tahun dasar 2007 untuk inflasi tahun 2009-2013 serta tahun dasar 2012 untuk inflasi tahun 2014 – 2018. Sejak tahun 2013 pengukuran inflasi diperluas menjadi dua kota yakni Kota Denpasar dan Singaraja.

Grafik I.10
Inflasi Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2009 – 2018



Grafik I.11
Inflasi Bulanan Singaraja, Denpasar dan Nasional,
2016 - 2018



Inflasi pada tahun 2018 menunjukkan penurunan di tingkat Nasional dibandingkan dengan tahun 2017. Inflasi di Kota Singaraja tercatat 1,88 persen atau menurun 1,50 poin dibandingkan dengan Tahun 2017. Sementara itu, inflasi Kota Denpasar di tahun 2018 tercatat 3,40 persen atau meningkat tipis 0,09 poin dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel I.10

Laju Inflasi Singaraja dan Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran, 2016-2018

Kelompok / Group	Denpasar			Singaraja		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1. Laju inflasi	2,94	3,31	3,40	4,57	3,38	1,88
2. Inflasi Menurut Kelompok						
2.1. Bahan Makanan	4,51	1,96	5,86	9,98	-3,39	4,33
2.2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	7,70	6,85	2,39	4,08	3,15	0,77
2.2. Perumahan	0,39	2,45	1,56	1,83	8,44	-3,07
2.4. Sandang	5,41	0,32	1,47	8,47	6,53	4,42
2.5. Kesehatan	3,68	1,48	2,69	4,65	5,02	2,67
2.6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	3,10	2,89	3,89	6,24	7,48	10,51
2.7. Transportasi dan Komunikasi	-0,03	4,44	4,86	-3,48	5,85	4,16

Dilihat dari pergerakan inflasi per bulan, inflasi di Kota Singaraja terlihat memiliki gerakan yang relatif berbeda dengan inflasi Kota

Denpasar maupun nasional. Fluktuasi inflasi di Kota Singaraja tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Denpasar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *spike* yang tajam ke atas mau pun curam ke bawah pada **Grafik I.11**. Artinya, terjadi tingkat inflasi yang lebih tinggi maupun deflasi yang lebih dalam di Kota Singaraja.

Sementara pola pergerakan periodik inflasi baik nasional, Kota Denpasar, maupun Singaraja menunjukkan kesejajaran. Inflasi yang tinggi tercatat pada bulan Juli dan Desember. Sementara itu, kecenderungan penurunan harga/deflasi tercatat pada bulan Oktober. Siklus tahunan yang mempengaruhi tingginya nilai inflasi bulan Juli umumnya karena adanya tahun ajaran baru sekolah dan memasuki bulan puasa.

Dilihat dari kelompok komoditas konsumsi, pendorong pergerakan harga pada tahun 2018 antara dua kota di Bali sedikit berbeda. Di Kota Singaraja, inflasi tertinggi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan kelompok bahan makanan. Sementara di Kota Denpasar inflasi tertinggi justru pada kelompok bahan makanan jadi dan kelompok transportasi dan komunikasi.

BAB II

Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata

II.1 Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain, berupa jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi suatu negara. Secara umum perdagangan luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara.

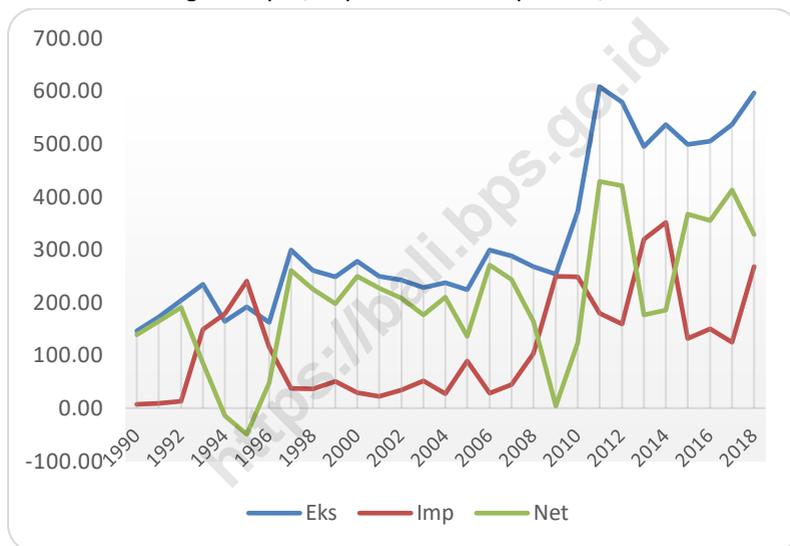
Sampai saat ini BPS masih menggunakan konsep F.o.B (*free on board*) untuk menilai besarnya ekspor barang dari satu wilayah. Konsep ini menegaskan bahwa besarnya ekspor dihitung di pelabuhan muat. Harga barang dihitung sampai di atas kapal negara pengekspor meliputi harga barang, pajak ekspor, biaya pengangkutan sampai ke batas negara, biaya asuransi, komisi, biaya pembuatan dokumen, biaya kontainer, biaya pengepakan dan biaya pemuatan barang ke kapal/pesawat udara atau alat transportasi lainnya. Keseluruhan ekspor barang dari Provinsi Bali merupakan komoditi ekspor non migas. Karena seperti diketahui bahwa Provinsi Bali tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi.

Sementara untuk impor barang adalah memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Konsep perhitungan impor yang digunakan BPS adalah c.i.f (*cost insurance and freight*), yaitu penyerahan barang impor di pelabuhan tujuan. Pengertiannya, harga

barang sampai di pelabuhan negara pengimpor, meliputi biaya pengangkutan dari batas negara pengeksport ke batas negara pengimpor, biaya bongkar barang dan biaya asuransi pengirim.

Grafik II.1

Perkembangan Ekspor, Impor dan Net Ekspor Bali, 1990 – 2018



Dilihat dari tren jangka panjang, ekspor dan impor di Provinsi Bali cenderung mengalami pergerakan yang meningkat secara simultan sejak tahun 2009. Pergerakan setahun terakhir, nilai ekspor dan impor sama-sama meningkat, tetapi impor mengalami peningkatan yang lebih pesat dibandingkan ekspor sehingga menyebabkan net ekspor impor mengalami penurunan, walaupun masih dalam posisi positif neraca luar negeri Bali. Porsi impor terhadap ekspor yang mengalami kenaikan perlu

diperhatikan karena memiliki dampak yang relatif besar terhadap pergerakan neraca luar negeri Bali. Tercatat Bali pernah dua kali mengalami defisit neraca luar negeri yaitu pada tahun 1994 dan 1995.

Tabel II.1
Ekspor Bali Menurut Negara Tujuan, 2017 - 2018

No.	Negara Tujuan	Jan - Des 2017		Jan - Des 2018 *)		Perubahan (%)
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%	
1	Amerika Serikat	152 105 195	28.35	164 508 013	27.61	8.15
2	Australia	47 514 813	8.86	46 718 265	7.84	-1.68
3	Jepang	40 590 107	7.57	43 674 122	7.33	7.60
4	Singapura	40 323 071	7.52	44 577 501	7.48	10.55
5	Tiongkok	32 334 508	6.03	47 931 442	8.04	48.24
6	Hongkong	22 455 172	4.19	33 076 999	5.55	47.30
7	Perancis	17 156 885	3.20	17 200 386	2.89	0.25
8	Jerman	15 493 388	2.89	16 774 199	2.82	8.27
9	Belanda	12 288 108	2.29	12 600 476	2.11	2.54
10	Spanyol	11 895 929	2.22	11 255 501	1.89	-5.38
11	Lainnya	144 390 746	26.91	157 526 391	26.44	9.10
Total		536 547 921	100.00	595 843 296	100.00	11.05

Keterangan:

*) Angka Sementara

Kumulatif ekspor barang asal Provinsi Bali pada periode Januari–Desember 2018 mencapai US\$ 595.843.296, atau mengalami kenaikan

11,05 persen dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 536.547.921. Menurut pangsa pasar, ekspor barang asal Provinsi Bali pada Tahun 2018, sebagian besar dikirim ke negara Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Singapura dan Jepang dengan proporsi masing-masing 27,61 persen, 8,04 persen, 7,84 persen, 7,48 persen, dan 7,33 persen.

Tabel II.2
Ekspor Bali Menurut Komoditas Utama, 2018

	Kelompok Komoditas Commodity Group	Volume Volume (kg)	Nilai Value (US\$)	Pangsa Export Segment (%)
1.	Ikan dan Udang	25 603 571	163 234 605	27.40
2.	Perhiasan / Permata	641 629	80 010 101	13.43
3.	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	3 306 657	75 577 087	12.68
4.	Kayu, Barang dari Kayu	13 429 039	51 249 757	8.60
5.	Perabot, Penerangan Rumah	11 674 730	37 905 495	6.36
6.	Barang-barang Rajutan	621 446	19 814 645	3.33
7.	Barang-barang dari Kulit	539 010	13 274 002	2.23
8.	Kertas / Karton	549 579	12 161 471	2.04
9.	Jerami / Bahan Anyaman	3 250 193	12 112 894	2.03
10.	Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen	10 231 560	11 104 504	1.86
11.	Komoditas Lainnya	23 610 747	119 398 733	20.04
Jumlah / Total :		93.458.161	595.843.296	100.00

Lebih dari seperempat ekspor Bali adalah komoditas ikan dan udang. Proporsi ini relatif sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kelompok komoditas lain yang memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Bali pada tahun 2018 antara lain perhiasan/permata dan pakaian jadi bukan rajutan yang masing-masing kontribusinya mencapai 13,43 persen dan 12,68 persen. Di sisi lain komoditas ekspor juga dapat dikatakan masih cukup homogen. Hal ini bisa dilihat dari persentase komoditas ekspor di luar kelompok sepuluh besar yang hanya sekitar 20 persen.

Tabel II.3
Impor Bali Menurut Negara Asal, 2018

	Negara Asal	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
1.	Hongkong	1 738 508	88 944 416	33.28
2.	Tiongkok	407 748	63 042 077	23.59
3.	Amerika Serikat	404 432	30 509 186	11.42
4.	Australia	981 815	10 741 226	4.02
5.	Singapura	7 537 211	9 276 548	3.47
6.	Jerman	140 878	8 521 471	3.19
7.	Perancis	162 368	7 908 475	2.96
8.	Kanada	192 929	7 648 367	2.86
9.	Thailand	133 483	6 342 789	2.37
10.	Italia	633 006	5 026 169	1.88
11.	Lainnya	6 735 035	29 280 659	10.96
Jumlah / Total :		19 067 413	267 241 383	100,00

Tabel II.4
Impor Bali Menurut Komoditas Impor, 2018

Kelompok Komoditas	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
1. Kapal Laut dan Bangunan Terapung	22 688	63 255 338	12,16
2. Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	316 557	36 019 777	11,60
3. Perhiasan / Permata	66 966	20 430 670	11,14
4. Lonceng, Arloji dan Bagiannya	106 791	20 306 567	9,83
5. Barang-barang dari Kulit	88 795	20 293 365	9,26
6. Mesin dan perlengkapan mekanik	576 933	18 898 039	8,41
7. Mesin dan peralatan listrik	268 561	10 525 296	6,60
8. Mainan	222 616	9 101 735	3,13
9. Tembakau	146 398	7 797 408	2,87
10. Perangkat Optik	55 018	4 896 326	2,51
11. Komoditas Lainnya	17 196 090	55 716 862	22,49
Jumlah / Total :	19 067 413	267 241 383	100,00

Secara kumulatif, impor barang Provinsi Bali periode Januari–Desember 2018 mencapai US\$ 267.241.383. Angka ini mengalami peningkatan yang relatif besar sekitar 53 persen dari nilai impor US\$ 124.431.061 di tahun 2017. Menurut pangsa pasar, impor barang Provinsi Bali (Januari–Desember 2018) sebagian besar berasal dari Hongkong, Tiongkok, Amerika Serikat, Australia dan Singapura dengan persentase

masing–masing sebesar 33,28 persen; 23,59 persen; 11,42 persen; 4,02 persen; dan 3,47 persen.

Dilihat dari jenis komoditas, tiga besar impor Bali adalah komoditas kapal laut dan bangunan terapung (12,16 persen), minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian (11,60 persen) dan perhiasan/permata (11,14 persen). Impor barang modal mesin dan perlengkapan berada di urutan keenam dan ketujuh yaitu berupa komoditas mesin dan perlengkapan mekanik sebesar 8,41 persen dan komoditas mesin dan perlengkapan listrik sebesar 6,60 persen. Persentase impor di luar sepuluh besar komoditas berada pada kisaran 22,49 persen.

II.2 Perkembangan Pariwisata

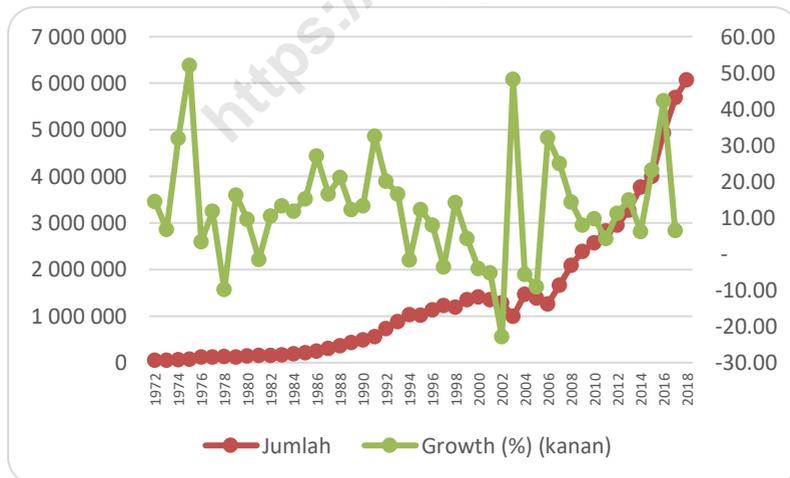
Pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi Bali sejak awal milenium ini. Pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan skala ekonomi Bali namun juga memperluas sumber pertumbuhan Bali menjadi lebih heterogen dibandingkan dengan ketika ekonomi Bali hanya digerakkan oleh sektor pertanian. Pariwisata merupakan kekuatan ekonomi yang punya potensi besar di masa yang akan datang. Sektor ini akan memiliki jangkauan lebih luas terutama didukung oleh semakin cepatnya mobilisasi manusia, serta semakin beragam dan semakin murah biaya transportasi.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali tahun 2018 mencapai 6,07 juta kunjungan, memecahkan jumlah kunjungan tertinggi yang dicapai di tahun 2017. Walaupun secara total

jumlah kunjungan wisman meningkat, tetapi jika dilihat laju pertumbuhan justru mengalami pertumbuhan yang melambat. Pertumbuhan kunjungan wisman ke Bali hanya mencapai 6.54 persen, menurun menjadi setengah kali lipat dari angka pertumbuhan di tahun 2017 yang masih di level dua digit. Kondisi ini perlu diperhatikan dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan jumlah kunjungan wisman ke Bali tetap terjaga di tengah ketatnya persaingan pariwisata dunia. Melihat data historis, tingkat pertumbuhan (*growth*) kunjungan wisman ke Bali memang sering mengalami pasang surut, tetapi jumlah kunjungan wisman masih tetap dapat ditingkatkan, mengingat Bali memiliki potensi pariwisata yang dapat terus dikembangkan.

Grafik II.2

Jumlah dan Pertumbuhan Kunjungan Wisman ke Bali



Tabel II.5
Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut kebangsaan

No.	Kebangsaan	Wisman Januari - Desember 2018				Wisman Jan-Des 2017 (Kunjungan)	Perubahan Wisman Desember 2018 Thd 2017 (%)
		Bandara (Kunjungan)	Pelabuhan Laut (Kunjungan)	Total (Kunjungan)	Persentase (%)		
1	Tiongkok	1.361.326	186	1.361.512	22,43	1.385.850	-1,76
2	Australia	1.155.240	13.975	1.169.215	19,26	1.094.974	6,78
3	India	352.652	1.242	353.894	5,83	272.761	29,75
4	Inggris	267.210	3.579	270.789	4,46	243.827	11,06
5	Jepang	260.246	1.420	261.666	4,31	252.998	3,43
6	Amerika Serikat	231.682	4.896	236.578	3,90	191.106	23,79
7	Perancis	195.657	77	195.734	3,22	177.864	10,05
8	Malaysia	192.529	2.231	194.760	3,21	170.459	14,26
9	Jerman	185.243	620	185.863	3,06	177.184	4,90
10	Singapura	141.543	3.006	144.549	2,38	125.934	14,78
11	Lainnya	1.683.831	12.082	1.695.913	27,94	1.604.782	5,68
Jumlah		6.027.159	43.314	6.070.473	100,00	5.697.739	6,54

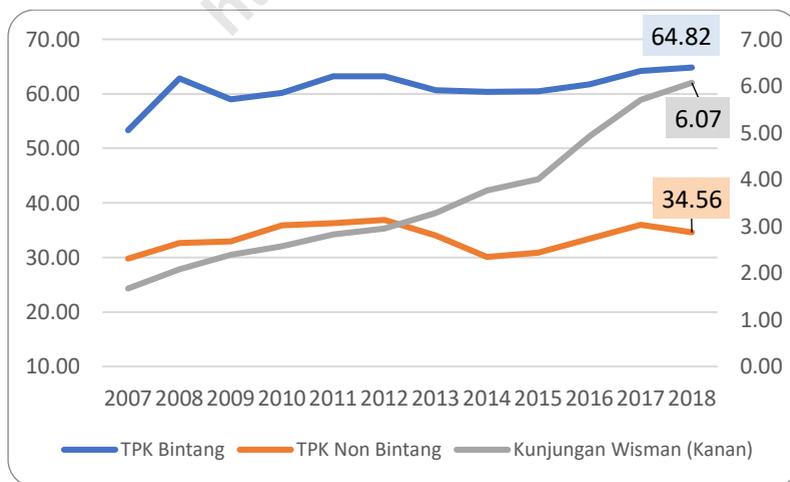
Secara kumulatif, pada periode Januari-Desember 2018, wisman yang datang langsung ke Bali telah mencapai 6.070.473 kunjungan. Jumlah kunjungan ini meningkat 6,54 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wisman asal Tiongkok memberikan kontribusi terbesar terhadap proporsi kedatangan wisman ke Bali yang mencapai 22,43

persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -1,76 persen. Wisman asal Australia memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 19,26 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,78 persen. Peningkatan jumlah kunjungan wisman tertinggi berasal dari wisman kebangsaan India sebesar 29,75 persen.

Berdasarkan pintu kedatangan wisman langsung ke Bali, sebagian besar wisman menggunakan jalur bandara. Penggunaan jalur pelabuhan laut sebagai jalur kedatangan langsung wisman masih sangat kecil yaitu dibawah satu persen. Pengembangan pelabuhan laut perlu diperhatikan karena pelabuhan laut menjadi jalur alternatif untuk akses keluar masuk Bali ketika terjadi kendala pada jalur penerbangan (bandara) seperti ketika terjadi bencana erupsi Gunung Agung.

Grafik II.3

TPK Hotel Bintang, Non Bintang dan Kunjungan Wisman Ke Bali, 2008 - 2018



Selain jumlah kedatangan wisman, indikator lain yang kiranya perlu diperhatikan adalah tingkat penghunian kamar (TPK) hotel. Indikator ini merupakan rasio jumlah kamar yang terjual dibagi dengan jumlah kamar keseluruhan di sebuah hotel. Pergerakan nilai TPK baik untuk hotel bintang maupun non bintang tidak sebanding dengan pergerakan jumlah kunjungan wisman yang meningkat signifikan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kamar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah wisman akibat banyaknya pembangunan hotel di Bali pada beberapa tahun terakhir.

Grafik II.4
Perkembangan Rata-rata Lama Menginap Hotel Bintang,
2009 – 2018



Tren rata-rata lama menginap di hotel bintang juga memiliki pergerakan yang tidak sebanding dengan pergerakan jumlah kunjungan

wisman. Pada periode 2009 – 2016, terjadi trend penurunan dari rata-rata lama menginap tertinggi pada kisaran empat hari turun menjadi kisaran dua hari. Rata-rata lama menginap baru perlahan mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018. Apabila mengacu pada angka rata-rata lama tinggal (*length of stay*) di Bali, ada kecenderungan wisman untuk berpindah-pindah hotel selama di Bali relatif tinggi.

<https://bali.bps.go.id>

BAB III

Pembangunan Sosial dan Pembangunan Manusia

III.1 Perkembangan Kondisi Kemiskinan

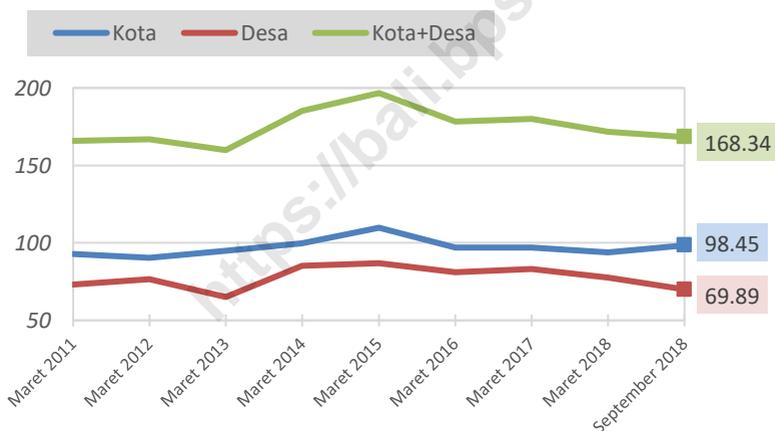
BPS mengidentifikasi masalah kemiskinan muncul karena ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian maupun perumahan. Namun nyatanya permasalahan kemiskinan kini lebih kompleks yaitu menyangkut pada kebutuhan sosial bermasyarakat, serta pada masalah informasi bahkan standar hidup yang memadai. Permasalahan kemiskinan yang dulunya dinilai hanya bersifat searah (sebab-akibat) kini dipandang sebagai permasalahan yang bersifat resiprokal (saling mempengaruhi), sehingga dalam ungkapan yang lebih spesifik kemiskinan adalah salah satu *excess* dari beragam *excess* lain yang muncul akibat siklus perekonomian dan kemajuan sosial¹.

Sebagai permasalahan yang multi-dimensional, solusi untuk masalah kemiskinan seyogyanya juga bersifat multi-dimensional. Pemerintah menjadi pilar utama bangunan sosial-ekonomi yang mampu memayungi masyarakat dari bahaya kemiskinan. Artinya solusi yang dilakukan pemerintah hendaknya mampu meng-*counter* setiap *excess* yang ditimbulkan oleh kemiskinan di samping secara paralel mengurangi angka kemiskinan itu sendiri.

¹ CK. Prahalad. The Bottom of Pyramid

Jumlah penduduk miskin di Bali relatif terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penduduk miskin masih mendiami wilayah perkotaan, meskipun jumlah ini tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan. Hingga September 2018, Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 98,45 ribu jiwa sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan sekitar 69,89 ribu jiwa.

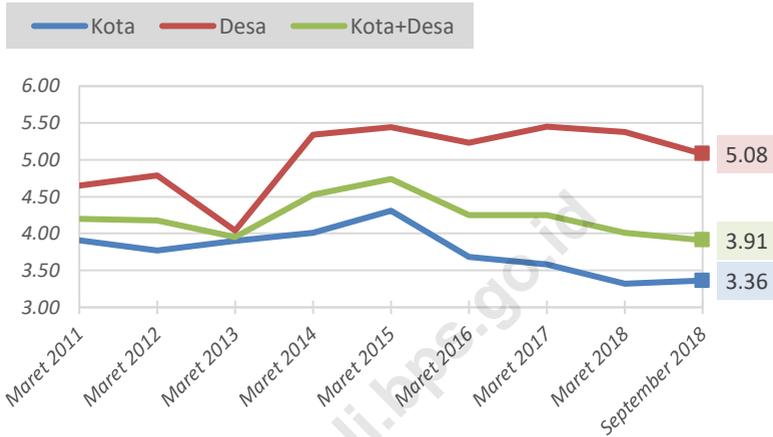
Grafik III.1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2011 – 2018



Di sisi lain semakin menurunnya persentase penduduk yang menempati daerah pedesaan dibandingkan perkotaan mengakibatkan *gap* persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan semakin jauh. Persentase penduduk miskin di tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, *gap* persentase ini semakin terbuka lebar di tahun 2018.

Grafik III.2

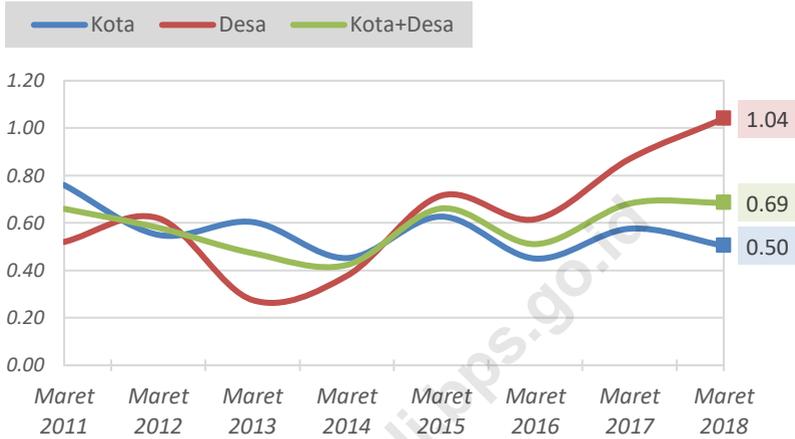
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2011-2018



Penurunan persentase penduduk miskin tidak sejalan dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Bali. Hanya saja, sejak tahun 2015 indeks kedalaman di wilayah perkotaan justru lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah perkotaan rata-rata memiliki tingkat konsumsi yang lebih mendekati garis kemiskinan dibandingkan dengan yang bermukim di pedesaan. Selain itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peluang penduduk miskin di wilayah perkotaan untuk terlepas dari kemiskinan juga lebih kecil dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perkotaan.

Grafik III.3

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali, 2011-2018

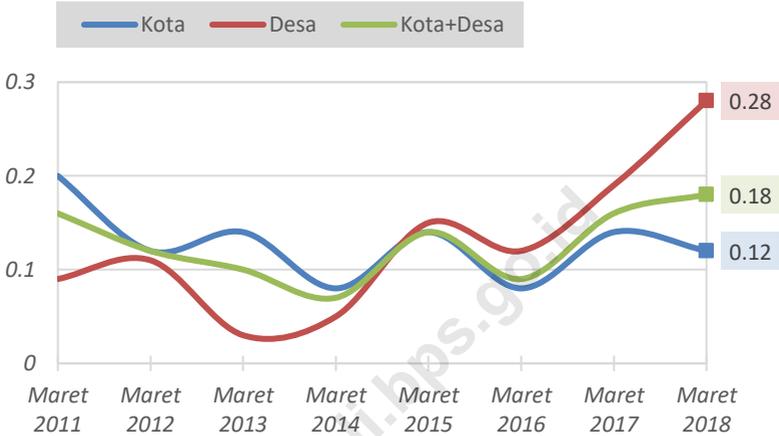


Secara umum, tingkat keparahan juga menunjukkan pergerakan yang relatif menyerupai pergerakan indeks kedalaman kemiskinan. Lebih lambat nya peningkatan persentase penduduk miskin di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, yang ditandai dengan tren penurunan yang lebih lambat di wilayah pedesaan, kemungkinan karena penciptaan sumber-sumber ekonomi yang tidak seragam di wilayah pedesaan.

Sementara itu, penciptaan sumber-sumber lapangan kerja yang lebih merata di perkotaan mengakibatkan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan.

Grafik III.4

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali, 2011-2018



III.2 Perkembangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan penduduk dihitung untuk mengetahui apakah pada dasarnya kemajuan perekonomian sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja. Bali sebagai daerah tujuan wisatawan yang mengandalkan investasi luar untuk pembangunan pariwisatanya, yang secara dominan bertujuan untuk membangun infrastruktur penunjang dari kegiatan pariwisata itu sendiri.

Tidak heran karena tingginya investasi dari luar negeri banyak pihak yang meragukan apakah pada dasarnya investasi yang diberikan sebanding dengan apa yang masyarakat Bali dapatkan terutama dikaitkan dengan output yang dihasilkan oleh investasi itu. Timbul juga keraguan beberapa pihak, apakah investasi itu mampu mensejahterakan sebagian

besar penduduk, atau malah menambah lebar jurang kesenjangan pendapatan itu sendiri.

Hal yang umum dilakukan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (kemiskinan relatif) suatu daerah adalah dengan pendekatan kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Adapun kriteria Bank Dunia yang umum dihitung adalah tingkat ketimpangan penduduk yang terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Kriteria ketimpangan pendapatan adalah sebagai berikut:

- ◆ **Ketimpangan Tinggi** (*high inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan rendah/kurang”.
- ◆ **Ketimpangan Sedang** (*moderate inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan sedang”.
- ◆ **Ketimpangan Rendah** (*low inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan penduduk. Dapat dikatakan “pemerataan tinggi/baik”.

Distribusi pendapatan penduduk merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan yang tinggi hendaklah diikuti oleh pemerataan “kue

ekonomi” agar tujuan menyejahterakan penduduk dapat tercapai. Salah satu ukuran (indikator) yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (kemiskinan relatif) adalah distribusi pendapatan dan gini rasio.

Menurut rasio Gini ketimpangan dalam pendapatan dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

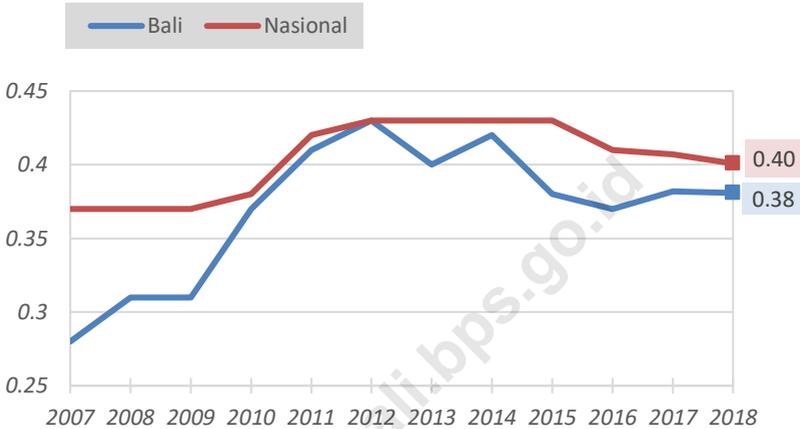
1. **Ketimpangan rendah** jika angka Gini berkisar dari 0,1 hingga 0,2
2. **Ketimpangan sedang** jika rasio Gini berkisar diatas 0,2 hingga 0,5
3. **Ketimpangan tinggi** jika rasio Gini berada diatas 0,5

Sepanjang tahun 2007-2018 terjadi perubahan level pada tingkat ketimpangan di Bali dan Nasional. Dalam kurun waktu enam tahun tingkat ketimpangan Bali meningkat hingga mendekati, atau bahkan melebihi tingkat ketimpangan secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di Bali lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah lain yang ada di Indonesia.

Di saat yang bersamaan indikator ini juga menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Bali dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia. Di tahun 2018 koefisien Gini mencapai angka 0,384. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,366.

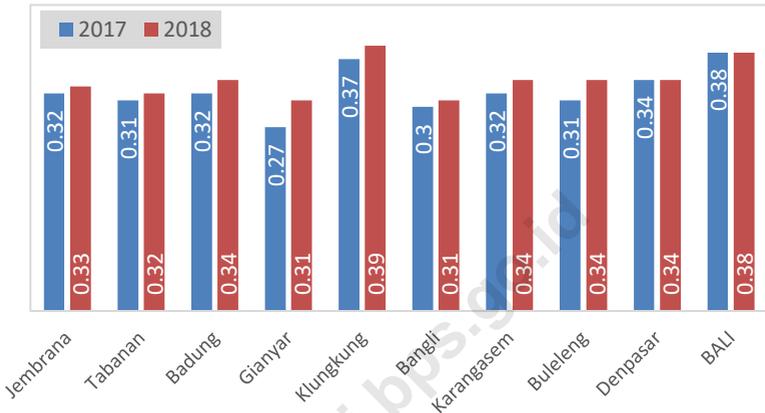
Grafik III.5

Koefisien Gini Bali dan Nasional, 2007 – 2017



Ketimpangan Bali juga lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan secara nasional sejak tahun 2013. Pada tahun 2018 ketimpangan nasional tercatat mencapai angka 0,401 atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,407. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan indeks gini relatif **tidak berpengaruh** terhadap kondisi sosial. Akan tetapi apabila transisi perubahan Gini **berlangsung sangat cepat** dampak yang dihasilkan terhadap kondisi sosial di masyarakat akan jauh lebih besar.

Grafik III.6
Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Bali, 2017 – 2018



Tahun 2018, tingkat ketimpangan Kabupaten Klungkung merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Bali, yakni sebesar 0,39 atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,37. Sebaliknya tingkat ketimpangan terendah Kabupaten Gianyar dan Bangli dengan koefisien gini yang sama yakni sebesar 0,31. Secara keseluruhan, tingkat ketimpangan kabupaten/kota pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan Provinsi Bali.

Koefisien Gini Provinsi Bali yang lebih tinggi dibandingkan koefisien Gini tertinggi kabupaten/kota di Bali menunjukkan tingginya tingkat ketimpangan antar daerah di Bali. Tingkat ketimpangan antar daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan penduduk dalam suatu wilayah.

Di lain pihak meningkatnya ketimpangan di Jembrana dan Klungkung juga cenderung akibat faktor eksternal, dari semakin jenuhnya perekonomian di pusat Bali. Tabanan berkembang karena menerima keuntungan dari akses penuhnya populasi Badung dan Denpasar sementara Buleleng menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya migrasi dan permintaan domestik sejalan dengan peran pentingnya sebagai salah satu pusat pendidikan di Bali. Tingkat harga dan biaya dari faktor produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan Denpasar dan Badung telah membuat kedua daerah ini menjadi salah satu tujuan utama investasi di pulau Bali.

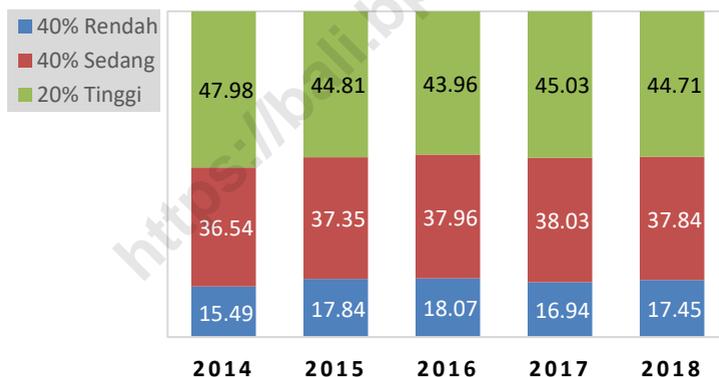
Di kabupaten-kabupaten ini laju ketimpangan berlangsung lebih cepat. Daerah dengan output-output yang besar semakin tidak terbanding dalam hal ketimpangan karena tidak adanya pengelolaan pada distribusi ekonomi mereka ke daerah di sekitarnya. Padahal jika diperhatikan secara lanjut, ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merugikan daerah-daerah ini akibat dampak non ekonomisnya seperti halnya berlebuhnya populasi, dan masalah sosial lain yang merupakan ujung dari daya tarik berlebih mereka sendiri. Sementara di sisi lain, pertumbuhannya cenderung akan terjadi karena meningkatnya konsumsi penduduk.

Perkembangan ekonomi Bali sebagian besar dirasakan oleh kelompok pendapatan menengah. Kelompok ini secara nyata telah berkontribusi pada menurunnya persentase kue ekonomi ke kelompok

tertinggi. Kelompok ini juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi terutama akibat sangat kuatnya tarikan kelompok atas.

Di Bali dalam beberapa tahun terakhir, distribusi ekonomi mayoritas dinikmati oleh kelompok atas mencapai hampir separuh dari total kue ekonomi. Pada tahun 2018, kelompok atas menikmati 44,71 persen kue ekonomi Bali. Sebaliknya kelompok terbawah hanya memperoleh kurang dari selima kue ekonomi Bali, yakni sebesar 17,45 persen.

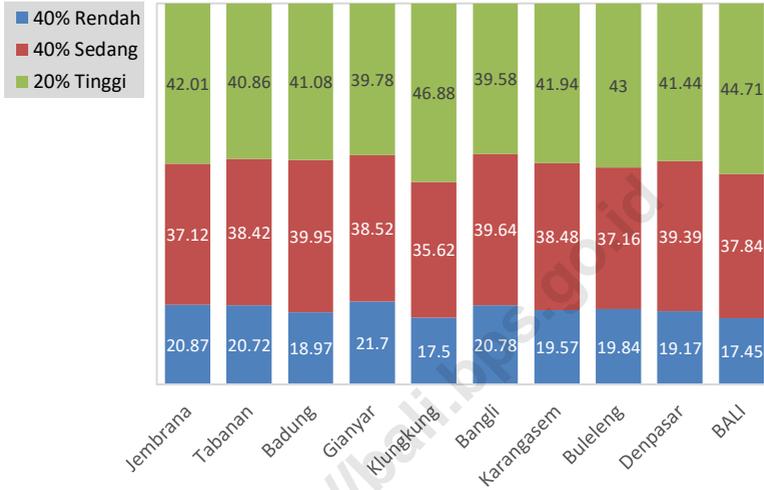
Grafik III.7
Distribusi Pendapatan di Bali, 2014 – 2018



Di Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar, meskipun sebaran pendapatan masih berimbang antara satu kelompok pendapatan dengan kelompok lainnya, akan tetapi bila dibandingkan dengan wilayah lain kedua kabupaten ini tergolong memiliki distribusi pendapatan yang paling timpang. Hal ini terjadi karena paling rendahnya distribusi ekonomi ke kelompok terbawah, akibat kuatnya tarikan pada kelompok teratas.

Grafik III.8

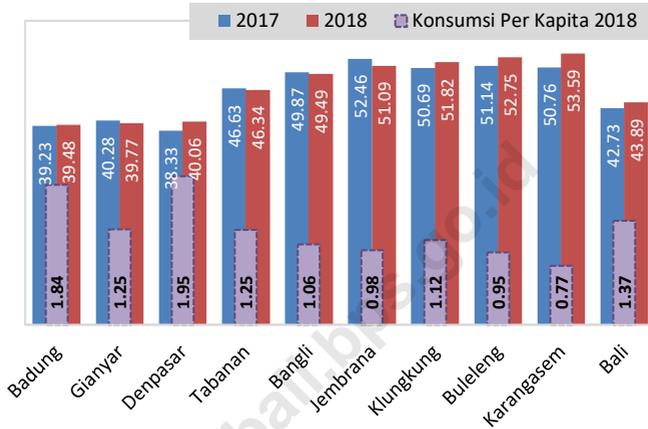
Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali, 2018



Sementara itu perubahan pada level konsumsi tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan pada level ketimpangan. Hal ini ditunjukkan oleh korelasi yang rendah pada kedua indikator. Peningkatan pada level konsumsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan rasio gini. Tentunya hal ini sedikit banyak mengindikasikan bahwa perubahan pada ketimpangan lebih banyak terjadi pada kelompok yang tidak terlalu berpengaruh pada nilai tengah, yang dalam konteks ini adalah kelompok dengan pengeluaran tertinggi.

Grafik III.9

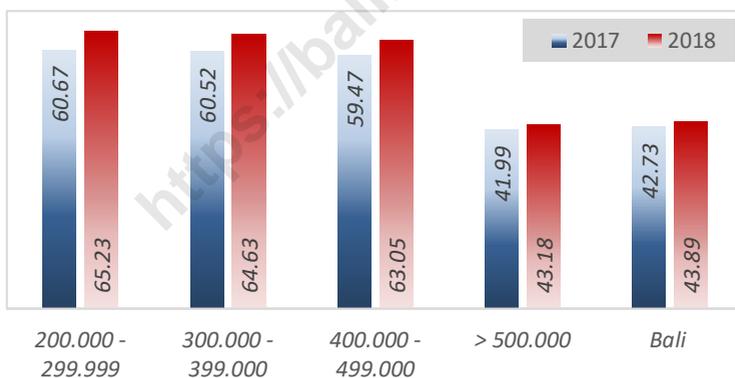
Distribusi Konsumsi Makanan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2017 dan 2018 Beserta Konsumsi Per Kapitanya



Secara umum hanya tiga kabupaten yang mengalami penurunan pada proporsi konsumsi makanan di tahun 2018 yaitu Kabupaten Gianyar, Tabanan dan Bangli. Selama dua tahun terakhir, proporsi konsumsi non makanan masyarakat di beberapa kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (mencapai kurang dari 50 persen yakni pada kisaran 40 persen terhadap total konsumsi) yakni Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Sebaliknya proporsi konsumsi makanan di kabupaten lainnya lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan. Kabupaten ketiga wilayah tersebut mengalami penurunan proporsi konsumsi makanan, namun perubahannya hanya pada kisaran kurang dari 1 persen.

Di sisi lain ada hal yang cukup menarik diamati terkait dengan konsumsi masyarakat Bali. Pada wilayah dengan tingkat pengeluaran tertinggi, rasio konsumsi makanan justru semakin rendah. Sebagai contoh wilayah Denpasar dan Badung yang konsumsi per kapitanya di atas 1 juta Rupiah komposisi konsumsi makanan di bawah 40 persen. Kondisi ini cukup berbeda dengan Karangasem. Dengan konsumsi per kapita kurang dari setengah Denpasar, proporsi konsumsi makanan mencapai lebih dari 50 persen.

Grafik III.10
Porsi Konsumsi Makanan Menurut Golongan Pengeluaran
Penduduk Bali, 2017 – 2018



Porsi konsumsi makanan pada golongan pengeluaran pada grafik III.10 menggambarkan bahwa semua golongan pengeluaran Penduduk Bali pada tahun 2018 yang mengkonsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Penduduk Bali mengkonsumsi makanan pada Tahun 2018 sebesar 43,89 persen meningkat 1,16 poin dibandingkan Tahun 2017.

III.3 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang memiliki peran strategis dalam sebuah pembangunan terutama peran dalam kegiatan produksi. Hanya saja dalam prosesnya, optimalisasi produktivitas tenaga kerja berbeda dibandingkan dengan optimalisasi faktor produksi atau sumber daya modal lainnya. Apabila peningkatan produktivitas sumber daya modal ditempuh melalui riset dan teknologi maka proses peningkatan pada sumber daya manusia harus melewati jalan panjang yaitu berupa peningkatan pada aspek-aspek kehidupan mereka yang ditempuh dengan perbaikan kualitas hidup terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan terutama dengan meningkatkan insentif dan memberikan jaminan/tanggungjawab, permasalahan ketenagakerjaan masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini tidak bersifat lokal atau hanya terjadi di Bali melainkan memiliki skala nasional. Beberapa di antaranya adalah *outsourcing*, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta masalah tenaga kerja asing. Permasalahan *outsourcing* masih belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terjadi karena meskipun aspek legalitas serta tata laksana *outsourcing* sudah diatur, implementasi pengelolaan yang baru belum sepenuhnya dilaksanakan.

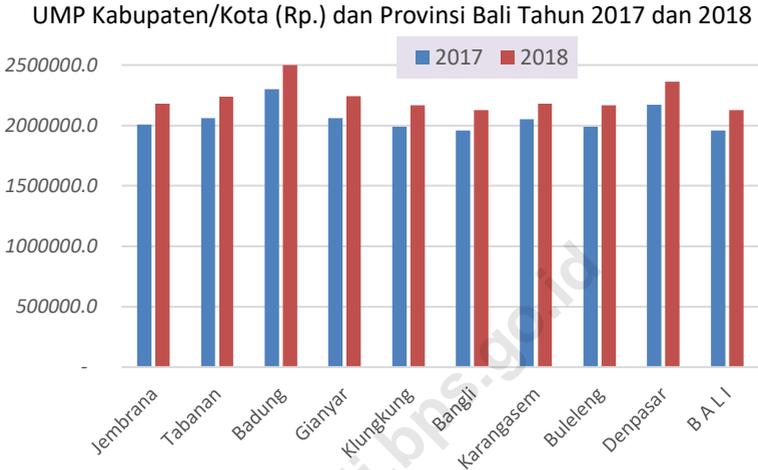
Masalah pengupahan cukup rumit dalam ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena menurut beberapa kalangan upah adalah insentif utama dengan peran yang jauh lebih penting dibandingkan dengan insentif

lainnya untuk tenaga kerja di negara berkembang. Oleh karena itu, keseimbangan antara tingkat upah yang layak bagi buruh maupun pengusaha sulit tercapai. Di sisi lain sistem pengupahan di Indonesia masih menggunakan upah untuk status lajang sehingga akan menjadi kurang ketika upah yang diberikan digunakan untuk menghidupi sebuah keluarga atau rumah tangga.

Sementara itu konsep upah minimum seringkali berbeda dalam implementasinya. Upah minimum hanya mampu diterapkan pada pekerja dengan status pekerja formal namun sangat sulit diterapkan dalam pekerja informal. Tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia membuat sebagian besar pekerja mau menerima upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan. Selain itu minimnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja seringkali juga berdampak pada standar upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Bali pada tahun 2018 tercatat di Kabupaten Badung yang mencapai 2,49 juta Rupiah/bulan. Di sisi lain UMK terendah tercatat di Kabupaten Bangli yang tercatat 2,13 juta Rupiah/bulan. Sementara itu Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tercatat mencapai 2,13 juta Rupiah/bulan. Persentase kenaikan upah minimum antara tahun 2017 dan 2018 cukup bervariasi antar wilayah, meskipun sebagian besar berada pada kisaran 8,71 persen, hanya Kabupaten Karangasem naik sebesar 6,24 persen.

Grafik III.11



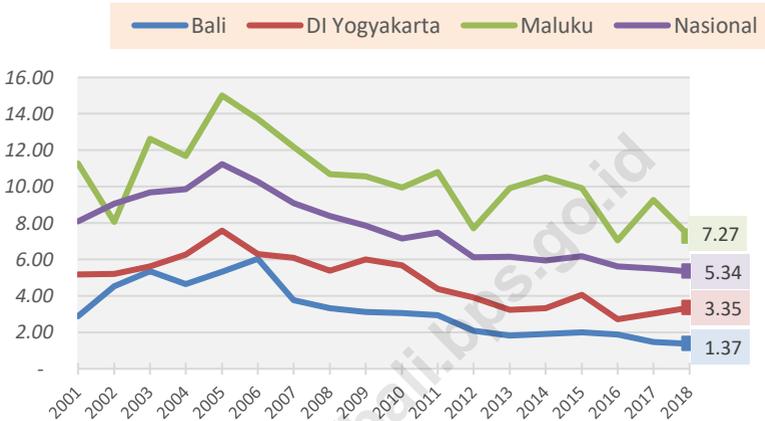
Selain pada penentuan upah minimum, perhatian tenaga kerja yang utama antara lain berkisar pada penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian.

Dalam teori ekonomi murni, pengangguran pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary unemployment*) artinya pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak mau bekerja pada sembarang tingkat upah tertentu, jika seseorang mau bekerja apa saja pada tingkat upah berapa saja maka pengangguran tidak akan terjadi.

Teori ekonomi juga meyakini bahwa pada dasarnya daerah memiliki tingkat pengangguran tinggi karena sedikitnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan angkatan kerja. Untuk itu kiranya diperlukan apa yang disebut sebagai pengembangan spesialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Grafik III.12

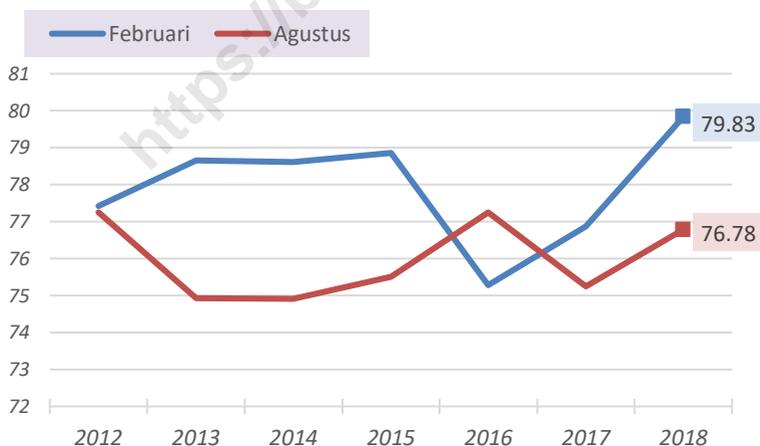
Tingkat Pengangguran Terbuka Bali, Nasional, dan Beberapa Provinsi, 2001-2018



Tren pengangguran selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Wilayah dengan sumber ekonomi berbasis agraris dan jasa relatif memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berbasis industri. Pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali sebesar 1,37 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 1,48 persen. Dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa pada 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 1 orang merupakan pengangguran. Sebaliknya, TPT di provinsi lain, seperti: DI Yogyakarta pada tahun 2018 meningkat dibandingkan Tahun 2017. Sesuai grafik III.12 selama beberapa periode tahun terakhir tren TPT nasional berada di atas TPT Bali dan TPT DI Yogyakarta.

Selain tingkat pengangguran terbuka, perhatian pada ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) seperti grafik III.13. TPAK yang tinggi memberikan indikasi pengangguran yang lebih rendah. TPAK dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. TPAK di tahun 2018 meningkat menjadi 76,78 persen dari 75,24 persen di tahun sebelumnya. TPAK bulan Februari selama tiga tahun terakhir memiliki tren yang sama dengan TPAK bulan Agustus. TPAK bulan Februari tahun 2018 (79,83%) mengalami peningkatan sebesar 2,96 poin dibandingkan tahun 2017 (76,87%).

Grafik III.13
TPAK Bali Bulan Agustus dan Februari, 2012 – 2018

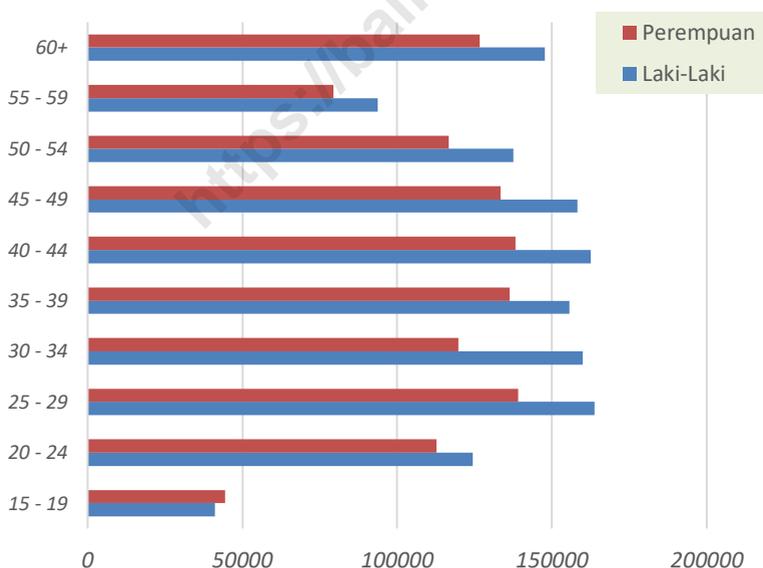


Dilihat dari usianya, sebagian besar tenaga kerja di Bali berada pada kelompok usia di atas 30 tahun. Meskipun demikian persentase

angkatan kerja yang bekerja untuk kelompok usia sekolah (15-24 tahun) juga relatif masih sangat tinggi. Persentase di kelompok usia ini mencapai angka sekitar 12,96 persen. Selain itu persentase untuk kelompok usia di atas 60 tahun juga cukup tinggi yaitu sekitar 11,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan murni Bali (memperhitungkan penduduk yang bekerja di semua kelompok umur) akan lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketergantungan secara keseluruhan.

Grafik III.14

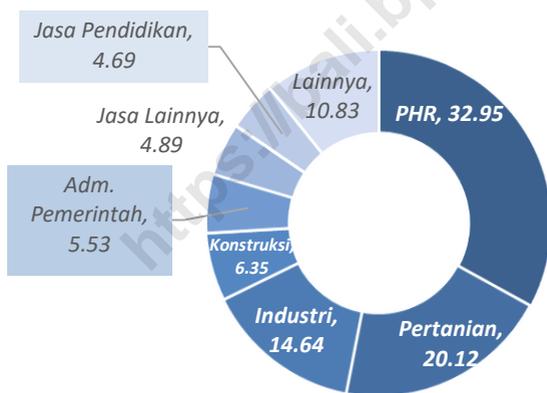
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Bali, 2018



Dari 2,49 juta angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2018, lebih dari setengahnya bekerja di sektor jasa terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (32,95 persen). Di sisi lain angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 20,12 persen sedangkan di Industri pengolahan berada pada kisaran sekitar 14,64 persen.

Grafik III.15

Proporsi Angkatan Kerja Menurut Sektor di Bali, 2018



III.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

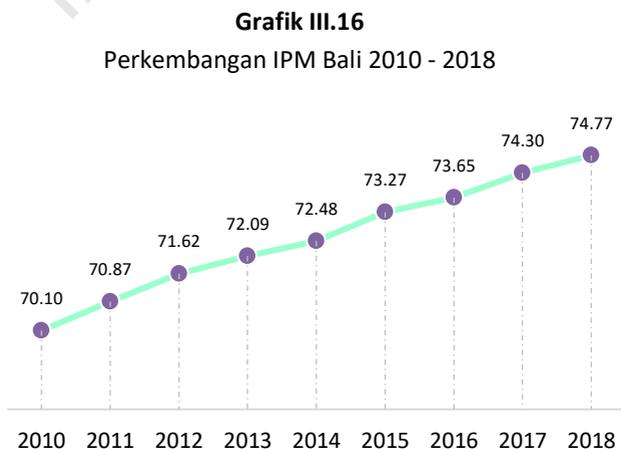
Sebagai salah satu indikator pokok untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, IPM seringkali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tiga sudut pandang kelayakan hidup yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen ini diberikan bobot yang setara akan tetapi berbeda dalam konfigurasiya sendiri.

Konsep IPM ini telah lama diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub al Haq, dua ekonom dari Asia Selatan. Dalam perjalanannya hanya Sen yang kemudian menjadi nobelis ekonomi untuk karya-karyanya di bidang pemerataan pembangunan. Terlebih dari indeks awal yang diterbitkan oleh UNDP, Badan Pusat Statistik melakukan pematokan ulang (refiksasi) untuk standarisasi IPM agar sekiranya bisa digunakan untuk mewakili kondisi di Indonesia. Kalibrasi ulang ini juga diperlukan untuk menjaga keterbandingan wilayah-wilayah di Indonesia.

Pada Human Development Report (HDR) tahun 1990 UNDP memperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Nilai dari ketiga indikator itu kemudian digabungkan atau diagregasi dengan menggunakan rata-rata hitung atau aritmetis.

Penyempurnaan pertama untuk metode ini dilakukan pada tahun 1991. Pada revisi yang pertama ini, komponen pendidikan tidak hanya menggunakan AMH melainkan kombinasi antara AMH dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Metode agregasi tidak mengalami perubahan pada revisi ini.

Pada penyempurnaan kedua di tahun 1995, komponen RLS dihilangkan dari penghitungan. Komponen ini kemudian digantikan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dihitung dari setiap jenjang pendidikan. Sementara itu pada revisi ketiga di tahun 2010 tidak hanya mengubah metode agregasi dengan metode geometrik, akan tetapi menandai kembalinya RLS sebagai indikator acuan penghitungan. Pada tahun ini komponen AMH dihilangkan dan digantikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) karena indikator ini dianggap sudah stagnan dan kurang mencerminkan keragaman.



IPM Bali pada tahun 2010-2018 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2018, IPM Bali tercatat sebesar 74,77. Sementara pada tahun 2010, IPM Bali hanya mencapai 70,1. Dengan kata lain, peningkatan IPM selama tahun 2010 hingga tahun 2018 mencapai 4,67 poin. Secara rata-rata, peningkatan IPM setiap tahun selama periode tahun 2010-2018 mencapai 0,58 poin.

Pertumbuhan IPM pada periode tahun 2010 hingga tahun 2017 tidak mengubah status capaian IPM Bali. Status IPM Bali masih digolongkan “tinggi” untuk tahun 2018. Capaian ini juga tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010. Selain itu capaian IPM Bali tahun 2018 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target minimum RPJMD yang mencapai 75,35 pada tahun 2016.

Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota di Bali (Tabel III.2), maka hanya IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang tercatat pada capaian IPM golongan “sangat tinggi”. Capaian IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi” di tahun 2012. IPM tertinggi kedua setelah Kota Denpasar ditempati oleh Kabupaten Badung. IPM Kabupaten Badung pada tahun 2017 mengalami pergeseran status menjadi sangat tinggi dengan capaian IPM sebesar 80,54. Periode tahun ini, capaian kedua wilayah tersebut masih menempati posisi dua besar tertinggi dibandingkan wilayah lain di Bali. Pada tahun 2018 capaian IPM Kota Denpasar mencapai 83,3 dan IPM Kabupaten Badung mencapai 80,87.

Tabel III. 1

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2010-2018

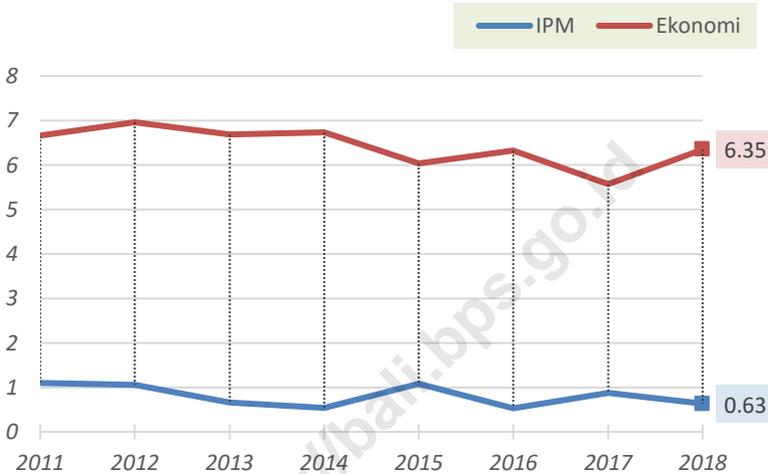
Bali	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IPM	70,1	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,3	74,77
Peningkatan		0,77	0,75	0,47	0,39	0,79	0,38	0,65	0,47
Pertumbuhan		1,1	1,06	0,66	0,54	1,08	0,53	0,88	0,63
Status IPM	Tinggi								

Sebelumnya pada tahun 2017, IPM Badung tercatat mencapai 80,54. Capaian IPM Badung tersebut bergeser dari golongan “tinggi” menjadi golongan “sangat tinggi”. Perubahan status juga dialami oleh Klungkung yang di tahun 2017, IPM-nya mencapai 70,13 atau pada status IPM “tinggi”, yang pada tahun sebelumnya hanya mencapai golongan “sedang” yakni 69,31.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka pola pertumbuhan IPM pada tahun 2010-2014 menunjukkan pergerakan yang sejalan. Namun, pada tahun 2015-2018, pola pertumbuhan IPM tampak berbanding terbalik dengan pola pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan apa yang dihasilkan oleh suatu proses ekonomi, memiliki korelasi yang rendah terhadap dampak yang dihasilkan sehubungan dengan kenaikan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas memiliki orientasi yang berbeda dalam proses pencapaiannya.

Grafik III.17

Pertumbuhan IPM dan Ekonomi Bali, 2011 – 2018



Dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan rata-rata selama enam tahun terakhir, diperkirakan pada tahun 2019 ada satu kabupaten yang akan mengalami perubahan pada status IPM-nya. Jika pola pertumbuhannya tetap stabil, Kabupaten Bangli yang kemungkinan akan mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi. Di lain pihak IPM Bali sendiri diperkirakan tidak mengalami perubahan status dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel III.2

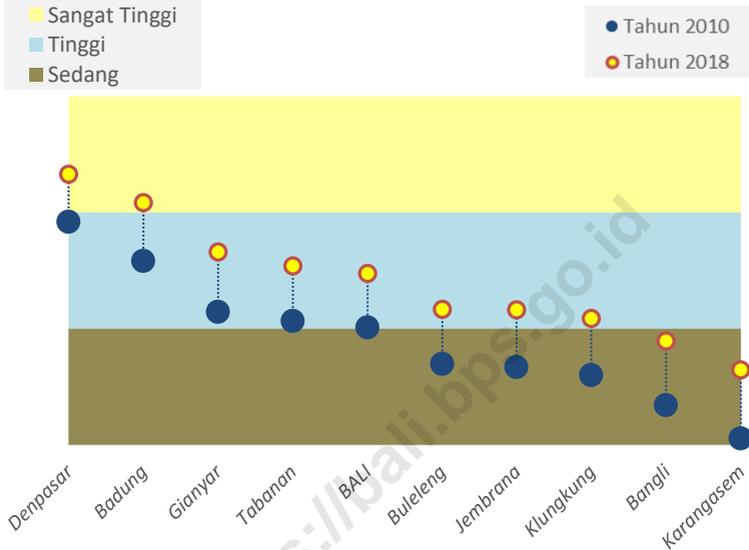
Perkembangan IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2016 - 2018

Kabupaten/Kota	IPM			Pertumbuhan			Status IPM Tahun 2018
	2016	2017	2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018	
Jembrana	70,38	70,72	71,65	1,03	0,48	1,32	Tinggi
Tabanan	74,19	74,86	75,45	0,88	0,90	0,79	Tinggi
Badung	79,8	80,54	80,87	1,19	0,93	0,41	Sangat Tinggi
Gianyar	75,7	76,09	76,61	0,89	0,52	0,68	Tinggi
Klungkung	69,31	70,13	70,90	0,48	1,18	1,10	Tinggi
Bangli	67,03	68,24	68,96	1,19	1,81	1,06	Sedang
Karangasem	65,23	65,57	66,49	0,85	0,52	1,40	Sedang
Buleleng	70,65	71,11	71,70	0,89	0,65	0,83	Tinggi
Kota Denpasar	82,58	83,01	83,30	0,41	0,52	0,35	Sangat Tinggi
Provinsi Bali	73,65	74,3	74,77	0,52	0,88	0,63	Tinggi

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hanya IPM Jembrana, Karangasem, Gianyar dan Buleleng yang pertumbuhan IPM di tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara kabupaten lain semuanya mengalami pelambatan. Kabupaten Badung tercatat mengalami perlambatan tertinggi pada tahun 2018 hanya meningkat sebesar 0,41 persen dibandingkan dengan pertumbuhan IPM pada tahun 2017 yang mencapai 0,93 persen atau sebesar 0,75 poin persen lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik III.18

Pergerakan Status Capaian IPM Bali, 2010 – 2018



Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Selain itu patokan nilai dasar juga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika tidak terjadi perubahan destruktif yang signifikan seperti halnya bencana alam, atau peperangan, capaian IPM relatif tidak akan mengalami penurunan.

Tabel III.3

Pertumbuhan IPM dan Komponennya Bali, 2016 - 2018

Komponen	Satuan	2016	2017	2018
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	71,41	71,46	71,68
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,04	13,21	13,23
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,36	8,55	8,65
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp Juta	13,28	13,57	13,89
IPM		73,65	74,3	74,77

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 AHH Provinsi Bali tercatat mencapai 71,68 tahun atau meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan pada AHH di tahun 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan tahun 2017 yang mencapai 0,05 tahun.

Kabupaten Badung tercatat memiliki AHH tertinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Bali. AHH Badung di tahun 2018 tercatat mencapai 74,71 tahun atau meningkat 0,21 poin tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. AHH tertinggi setelah Kabupaten Badung adalah Kota Denpasar yang di tahun 2018 ini AHH-nya mencapai 74,38 tahun. Sementara itu wilayah dengan AHH terendah pada tahun 2018 yakni Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem dengan capaian yang sama tercatat 70,05 tahun.

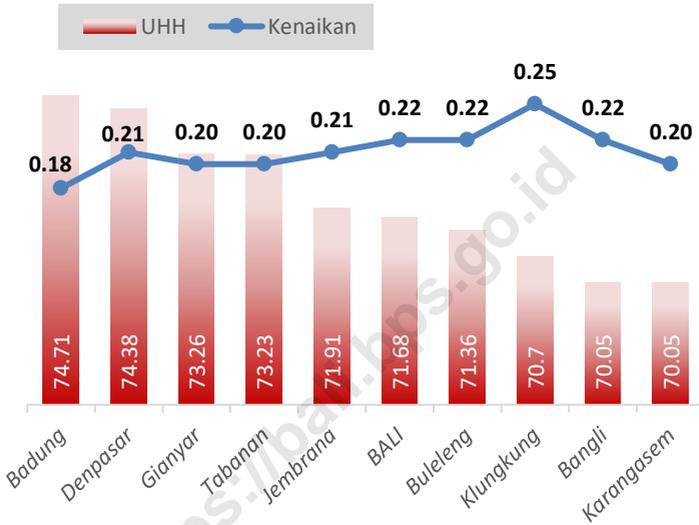
Tabel III.4
Umur Harapan Hidup (UHH) Bali, 2010-2018

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Jembrana	70,75	70,92	71,09	71,26	71,39	71,43	71,57	71,70	71,91	
Tabanan	72,02	72,18	72,35	72,52	72,64	72,74	72,89	73,03	73,23	
Badung	73,77	73,91	74,05	74,19	74,30	74,31	74,42	74,53	74,71	
Gianyar	72,31	72,43	72,57	72,71	72,78	72,84	72,95	73,06	73,26	
Klungkung	69,26	69,45	69,66	69,84	69,91	70,11	70,28	70,45	70,70	
Bangli	68,80	68,98	69,18	69,36	69,44	69,54	69,69	69,83	70,05	
Karangasem	68,56	68,76	68,96	69,12	69,18	69,48	69,66	69,85	70,05	
Buleleng	70,06	70,23	70,41	70,58	70,71	70,81	70,97	71,14	71,36	
Kota Denpasar	73,24	73,34	73,44	73,56	73,71	73,91	74,04	74,17	74,38	
BALI	70,61	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68	

Umur Harapan Hidup Kabupaten Bangli dan Karangasem meskipun terendah pada tahun 2018, namun memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Pertumbuhan AHH Bangli tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,22 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan tertinggi dicapai untuk AHH Kabupaten Klungkung yakni mencapai 0,25 persen. Sebaliknya pertumbuhan AHH terendah yaitu Kabupaten Badung dengan pertumbuhan sebesar 0,18 persen.

Grafik III.19

Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Bali dan Kenaikannya, 2018

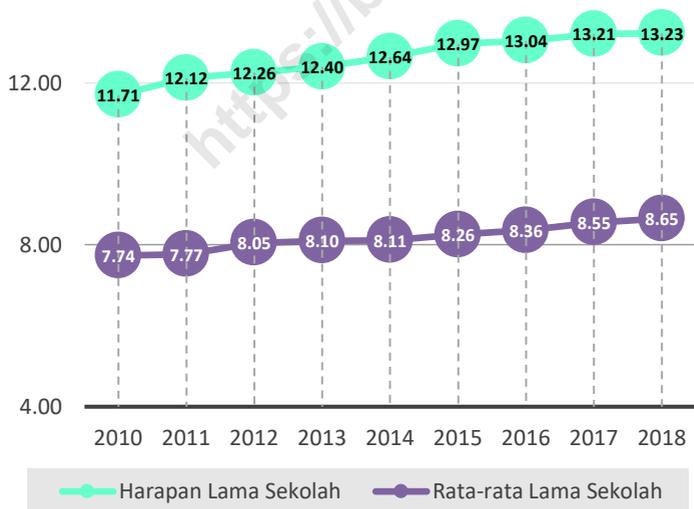


Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara teori apabila melihat kondisi terkini maka rata-rata lama sekolah akan lebih mencerminkan kondisi atau kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bali tercatat mencapai 13,23 tahun atau meningkat sebesar 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 13,21 tahun. Kenaikan HLS di tahun ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,19 tahun.

Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang juga mencerminkan dimensi pendidikan, menunjukkan Provinsi Bali di tahun 2018 tercatat mencapai 8,65 tahun. Komponen ini meningkat 0,1 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 8,55 tahun. Kenaikan ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,29 tahun. Capaian 8,65 tahun dari RLS menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Bali dengan usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan setara dengan kelas tiga SMP.

Grafik III.20

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali, 2010 – 2018 (Tahun)



Pada Tabel III.5 mengenai HLS menurut kabupaten/kota di Bali, mencatatkan Kota Denpasar sebagai daerah dengan HLS tertinggi di tahun 2018. Capaian HLS Kota Denpasar tercatat 13,98 tahun atau meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian HLS Denpasar di tahun 2018 hanya berada sedikit di atas Badung yang mencapai 13,95 tahun dan Gianyar dengan capaian 13,71 tahun. Di sisi lain, Bangli tercatat sebagai kabupaten dengan capaian HLS terendah yang hanya mencapai 12,31 tahun.

Secara umum kenaikan HLS pada periode 2017 – 2018 lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya kecuali Jembrana, Gianyar, dan Buleleng yang tercatat lebih tinggi. Kenaikan HLS tertinggi pada periode 2017-2018 tercatat di Kabupaten Gianyar dengan kenaikan mencapai 0,34 tahun. Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana juga mengalami kenaikan HLS lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, masing-masing sebesar 0,27 tahun dan 0,21 tahun.

Sebaliknya enam dari sembilan kabupaten/kota di Bali hanya mengalami kenaikan HLS sebesar 0,01 tahun. Dengan mengasumsikan level kenaikan masih tidak jauh berbeda dengan tahun ini, sangat terbuka kemungkinan HLS kabupaten Badung akan mampu menyamai Kota Denpasar.

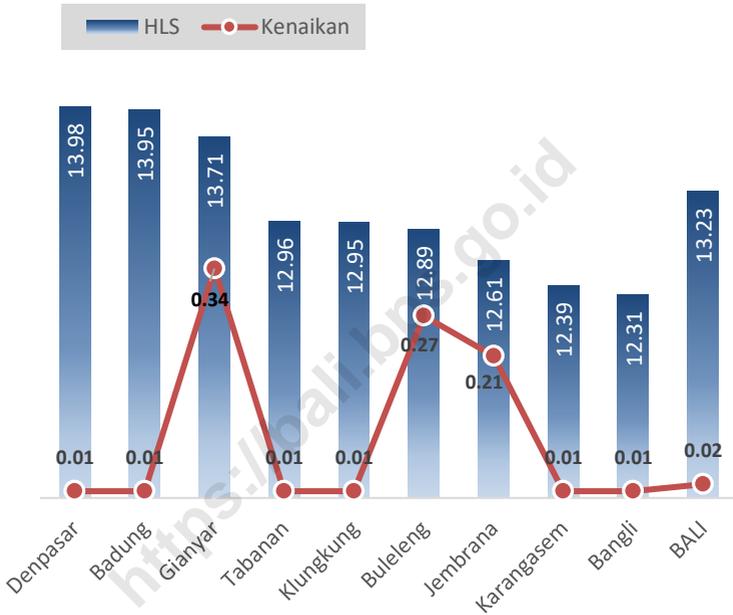
Tabel III.5

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali Menurut Kabupaten/kota,
2016-2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Kenaikan		
	2016	2017	2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Jembrana	12,27	12,40	12,61	0,39	0,13	0,21
Tabanan	12,87	12,95	12,96	0,4	0,08	0,01
Badung	13,66	13,94	13,95	0,21	0,28	0,01
Gianyar	13,36	13,37	13,71	0,01	0,01	0,34
Klungkung	12,86	12,94	12,95	0,01	0,08	0,01
Bangli	11,82	12,3	12,31	0,46	0,48	0,01
Karangasem	12,33	12,38	12,39	0,22	0,05	0,01
Buleleng	12,61	12,62	12,89	0,24	0,01	0,27
Kota Denpasar	13,76	13,97	13,98	0,01	0,21	0,01
Provinsi Bali	13,04	13,21	13,23	0,07	0,17	0,02

Pada tahun 2018, kenaikan HLS sebagian besar hanya sebesar 0,01 tahun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan yang cukup beragam. Selama periode tahun 2015-2016 dan 2016-2017, Kabupaten Bangli mengalami kenaikan HLS tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni pada kisaran lebih dari 0,45 persen.

Grafik III.21
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bali
dan Kenaikannya, 2018 (Tahun)



Komponen dimensi pendidikan lain yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) juga menunjukkan kenaikan di tahun 2018 untuk semua kabupaten/kota. Pada Tabel III.6 dilihat bahwa Kota Denpasar tercatat yang paling tinggi di tahun 2018, dengan RLS 11,16 tahun. Setelah Denpasar, kabupaten Badung dan Gianyar tercatat sebagai yang tertinggi dengan capaian RLS masing-masing 10,06 tahun dan 8,92 tahun. Sementara itu Karangasem tercatat sebagai kabupaten dengan RLS

terendah tercatat selama 5,97 tahun. Dengan capaian ini hanya Denpasar dan Badung yang tercatat memiliki RLS setara dengan pendidikan di atas SMP. Dilihat dari kenaikannya, hanya tiga kabupaten/kota yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Jembrana, Gianyar dan Karangasem. Kenaikan RLS tertinggi tercatat di Karangasem yang mencapai 0,45 tahun.

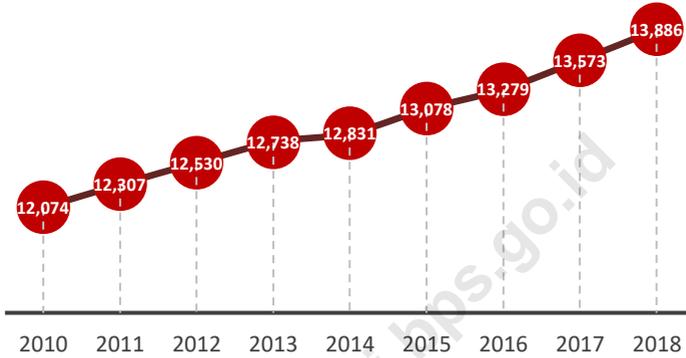
Kenaikan RLS Kabupaten Karangasem tercatat sebagai yang paling tinggi di tahun 2018. Kenaikan ini merupakan tertinggi di Kabupaten Karangasem selama tiga tahun terakhir. Begitupula Kabupaten Jembrana, Bangli dan Klungkung dengan kenaikan RLS cukup tinggi pada tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dengan RLS tertinggi tidak sejalan dengan pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir. RLS Kota Denpasar pada tahun 2018 tercatat kenaikan hanya sebesar 0,01 tahun. Begitupula RLS Kabupaten Badung tercatat naik sebesar 0,07 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, Kabupaten Gianyar pada tahun ini hanya mampu meningkatkan RLS sebesar 0,05 tahun.

Tabel III.6
Rata-rata Lama Sekolah/*Mean Years of Schooling* (MYS) Bali
Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2018

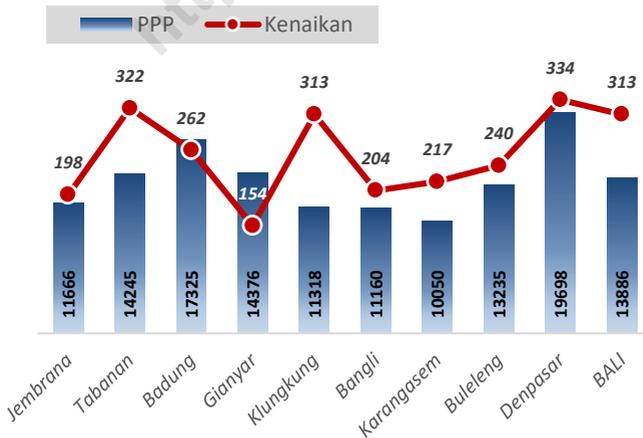
Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Kenaikan		
	2016	2017	2018	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018
Jembrana	7,59	7,62	7,95	0,05	0,03	0,33
Tabanan	8,1	8,43	8,64	0,03	0,33	0,21
Badung	9,9	9,99	10,06	0,46	0,09	0,07
Gianyar	8,86	8,87	8,92	0,37	0,01	0,05
Klungkung	7,06	7,46	7,75	0,08	0,4	0,29
Bangli	6,44	6,8	7,13	0,03	0,36	0,33
Karangasem	5,48	5,52	5,97	0,06	0,04	0,45
Buleleng	6,85	7,03	7,04	0,08	0,18	0,01
Kota Denpasar	11,14	11,15	11,16	0,12	0,01	0,01
Provinsi Bali	8,36	8,55	8,65	0,1	0,19	0,10

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp 13,86 juta rupiah per tahun atau meningkat 313 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik III. 22
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali,
 2010 - 2018 (Rp 000)



Grafik III.23
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Per Kabupaten/Kota,
 2018 (Rp 000)



Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kenaikan yang terjadi pada tahun 2018 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pengeluaran per kapita mengalami kenaikan 313 ribu rupiah. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kota Denpasar yang mencapai 19,69 juta rupiah. Selanjutnya, pengeluaran per kapita Badung merupakan pengeluaran per kapita tertinggi kedua setelah Kota Denpasar sebesar 17,33 juta rupiah. Kabupaten yang tercatat dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Karangasem yang mencapai 10,05 juta rupiah.

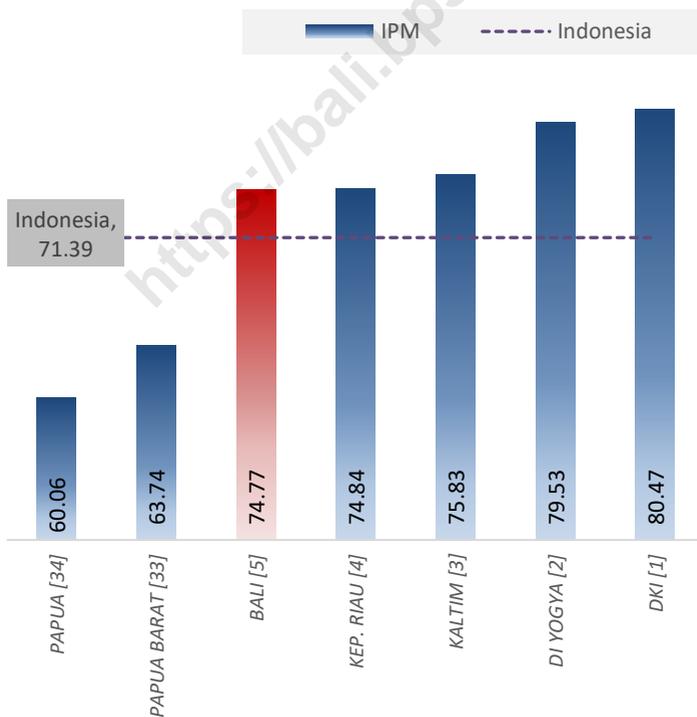
Tabel III.7
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten/kota di Bali, 2016-2018

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rp)			Kenaikan (Ribu Rp)		
	2016	2017	2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Jembrana	11.343	11.468	11.666	175	125	198
Tabanan	13.800	13.923	14.245	135	123	322
Badung	16.567	17.063	17.325	158	496	262
Gianyar	13.766	14.222	14.376	188	456	154
Klungkung	10.852	11.005	11.318	141	153	313
Bangli	10.819	10.956	11.160	170	137	204
Karangasem	9.690	9.833	10.050	134	143	217
Buleleng	12.814	12.995	13.235	227	181	240
Kota Denpasar	19.084	19.364	19.698	235	280	334
Provinsi Bali	13.279	13.573	13.886	201	294	313

Kenaikan pengeluaran per kapita tertinggi tercatat di Kota Denpasar. Kenaikan pengeluaran per kapita Kota Denpasar mencapai 334 ribu rupiah untuk tahun 2018. Setelah Denpasar, Kabupaten Tabanan tercatat mengalami kenaikan pengeluaran per kapita tertinggi kedua yang mencapai 322 ribu rupiah. Sementara itu, kenaikan pengeluaran per kapita terendah tercatat di Kabupaten Gianyar sebesar 154 ribu rupiah.

Grafik III.24

IPM Beberapa Provinsi di Wilayah Jabalnusra, 2018



Sama dengan tahun 2017, tahun ini posisi IPM Bali secara nasional masih menempati peringkat kelima. IPM Bali tercatat lebih rendah dari IPM DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Di regional JABALNUSRA tercatat dua provinsi masih berada pada kategori “sedang”. Di sisi lain kesenjangan IPM di regional Bali Nusra masih cukup terasa. Capaian IPM NTT misalnya hanya berada pada kisaran 64,39 sementara IPM NTB berada pada 67,3 pada tahun 2018. Kesenjangan tersebut lebih terlihat jika dibandingkan antar wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Perlambatan pertumbuhan wilayah timur dibandingkan wilayah barat mempengaruhi pergerakan IPM pada masa yang akan datang. Jika kondisi ini tetap terjadi selama lima tahun ke depan, angka IPM tersebut cenderung masih akan menempati posisi yang sama dengan tahun ini.



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Email: bps5100@bps.go.id

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2477-7587



9 772477 75800